

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI LAMPUNG**
WELFARE INDICATORS OF LAMPUNG PROVINCE **2014**

<http://lampung.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI LAMPUNG 2014**

Welfare Indicators of Lampung Province, 2014

<http://lampung.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2014

ISSN: 1907-4573

Nomor Publikasi / Publication Number: 18522.1502

Katalog BPS / BPS Catalogue: 4102004.18

Ukuran Buku / *Book Size*: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman / *Total Size*: xii + 88 halaman / *pages*

Naskah / *Manuscript*:

Bidang Statistik Sosial

Social Statistics Division

Gambar Kulit / *Cover Design*:

Bidang Statistik Sosial

Social Statistics Division

Diterbitkan oleh / *Published by*:

BPS Provinsi Lampung

BPS – Statistics of Lampung Province

Dicetak oleh / *Printed by*:

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2014 merupakan hasil dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang memuat informasi tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Lampung antar waktu dan perbandingan antar kabupaten/kota serta daerah tempat tinggal.

Kesejahteraan rakyat meliputi berbagai bidang kehidupan yang sangat luas, dimana tidak semuanya dapat diukur secara kuantitatif. Publikasi ini menyajikan informasi tentang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, pola konsumsi, kemiskinan, perumahan dan sosial lainnya. Sebagian besar data yang digunakan adalah data hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014 dan data pendukung dari pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2014.

Publikasi ini memuat pula hasil penghitungan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012 dan 2013 yang menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, November 2015
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
Kepala,

Adhi Wiriana

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	x
BAB I KEPENDUDUKAN.....	1
1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	2
1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	4
1.3. Rasio Beban Ketergantungan	6
1.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana.....	8
BAB II KESEHATAN DAN GIZI	13
2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat	14
2.2. Status Kesehatan	15
2.3. Status Kesehatan Balita.....	17
2.3.1. Pemberian ASI	17
2.3.2. Imunisasi Balita.....	19
2.4. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	20
2.4.1. Penolong Persalinan	20
BAB III PENDIDIKAN	25
3.1. Angka Melek Huruf	25
3.2. Tingkat Partisipasi Sekolah.....	27
3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	28
3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)	30
3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM).....	31
3.3. Rata-Rata Lama Sekolah.....	33
3.4. Pendidikan Yang Ditamatkan.....	35
BAB IV KETENAGAKERJAAN	37

	halaman
BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	43
5.1. Taraf Konsumsi Energi dan Protein	43
5.2. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita.....	44
5.3. Distribusi Pendapatan	46
 BAB VI KEMISKINAN	 49
6.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung, 2010-2015	 50
6.2. Perubahan Garis Kemiskinan.....	51
6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	 53
 BAB VII PERUMAHAN.....	 55
7.1. Kualitas Perumahan.....	55
7.2. Air Bersih dan Sanitasi	58
7.3. Fasilitas Penerangan Tempat Tinggal.....	60
 BAB VIII SOSIAL LAINNYA	 63
8.1. Perjalanan atau Bepergian.....	63
8.2. Akses Pada Teknologi, Komunikasi dan Informasi	64
8.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga	66

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2010-2014.....	2
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2014.....	3
Tabel 1.3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kabupaten /Kota, 2012-2014.....	5
Tabel 1.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan, 2011-2014...	7
Tabel 1.5. Rata-Rata Anak Lahir Hidup Wanita Berumur 15-49 Tahun, 2012-2014	9
Tabel 1.6. Persentase Wanita Perkawinan Pertama Kurang Dari 16 Tahun, 2012-2014	10
Tabel 1.7. Angka Prevalensi Kontrasepsi menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014	11
Tabel 2.1. Indikator Kesehatan Provinsi Lampung, 2012-2014	16
Tabel 2.2. Persentase Anak Usia 24-59 Bulan Yang Pernah Disusui menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	18
Tabel 2.3. Rata-rata Lama Disusui (bulan) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	18
Tabel 2.4. Persentase Anak Umur 12-59 Bulan Yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2012-2014	19
Tabel 2.5. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2012-2014	21
Tabel 2.6. Persentase Kunjungan Penduduk Yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Fasilitas Kesehatan, 2014	22
Tabel 2.7. Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Obat/ Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2012-2014.....	23
Tabel 3.1. Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014.....	26
Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014	28

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014.....	30
Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014.....	32
Tabel 3.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan, 2012-2014.....	35
Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014.....	38
Tabel 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014.....	39
Tabel 4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) menurut Kabupaten/Kota, 2014.....	40
Tabel 5.1. Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari, 2010-2014.....	43
Tabel 5.2. Konsumsi Rata-Rata dan Persentase Konsumsi Makanan / Non Makanan per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, 2010-2014.....	45
Tabel 5.3. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (%), 2014.....	46
Tabel 5.4. Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita dan Indeks Gini, 2010-2015.....	47
Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Tipe Daerah, 2010-2015	51
Tabel 6.2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret 2013-Maret 2015.....	52
Tabel 6.3. Garis Kemiskinan menurut Komponen dan Daerah, Maret 2013- Maret 2015	53

Tabel 6.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menurut Daerah, Maret 2013-Maret 2015.....	54
Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014.....	57
Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014.....	59
Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	61
Tabel 8.1. Persentase Penduduk Yang Melakukan Perjalanan/Bepergian Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	64
Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi, Komunikasi, dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	65
Tabel 8.3. Indikator-Indikator Raskin menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2014	4
Gambar 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2014	6
Gambar 1.3. Komposisi Penduduk Provinsi Lampung, 2014	7
Gambar 2.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung, 2010-2014	14
Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014	15
Gambar 2.3. Angka Kesakitan (%), 2012-2014	17
Gambar 2.4. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2014	20
Gambar 2.5. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dengan Pengobatan Sendiri, 2012-2014	23
Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas, 2010-2014	26
Gambar 3.2. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2014	29
Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2014	31
Gambar 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2014 ...	33
Gambar 3.5. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin, 2012-2014	34
Gambar 3.6. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	34
Gambar 3.7. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun Keatas, 2012-2014	36
Gambar 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung, 2014	41
Gambar 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung, 2014	42
Gambar 6.1. Persentase Penduduk Miskin, 2010-2015	50
Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2012-2014	57

Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2012-2014	60
Gambar 7.3. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014	61
Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi, Komunikasi, dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2012-2014.....	66

<http://lampung.bps.go.id>

<http://lampung.bps.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diberbagai aspek, pada hakekatnya adalah membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, penduduk merupakan pelaku sekaligus target dari pembangunan. Perlu diperhatikan pula bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas cenderung akan menjadi masalah dan beban pembangunan.

Dalam kaitannya mendukung pembangunan, maka informasi yang menggambarkan tentang penduduk sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan, baik di kalangan pemerintah maupun swasta. Informasi mengenai kependudukan seperti jumlah penduduk, distribusi penduduk, dan komposisi penduduk dapat dijadikan informasi dasar dalam pembuatan kebijakan dibidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan.

Bab ini menyajikan beberapa informasi mengenai komposisi dan distribusi penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Informasi ini berguna untuk mengetahui sumber daya manusia yang ada menurut kelompok umur, jenis kelamin, maupun persebarannya.

Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu, misalnya karakteristik demografi, sosial, ekonomi, dan geografis. Karakteristik demografis seperti pengelompokan penduduk menurut umur, jenis kelamin, wanita usia subur, dan jumlah anak. Karakteristik sosial antara lain pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. Karakteristik ekonomi antara lain dilihat dari kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan. Sedangkan karakteristik geografis merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-perdesaan, provinsi maupun kabupaten/kota.

Distribusi penduduk adalah kondisi persebaran penduduk secara keruangan. Persebaran penduduk dimaksudkan agar terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Distribusi penduduk umumnya dibedakan menjadi dua yaitu, persebaran penduduk secara geografis (berdasarkan faktor alam: iklim, kesuburan tanah, dll) dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota).

1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2014 sebanyak 8.026.191 jiwa dengan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 4.117.479 jiwa dan perempuan sebanyak 3.908.712 jiwa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 dimana Sensus Penduduk dilaksanakan, jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau naik sekitar 392.186 jiwa dari tahun 2010 yang hanya 7.634.005 jiwa.

Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 7.634.005 jiwa terdiri atas 3.922.783 laki-laki dan 3.711.222 perempuan. Bila dibandingkan dengan data hasil sensus 2000 yang tercatat sebesar 6.730.751 jiwa, maka dalam kurun waktu 2000-2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung bertambah sebesar 13,42 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,24 persen.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2010-2014

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	3 922 783	3 711 222	7 634 005
2011	3 973 517	3 762 397	7 735 914
2012	4 022 912	3 812 396	7 835 308
2013	4 070 935	3 861 197	7 932 132
2014	4 117 479	3 908 712	8 026 191

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Proyeksi Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.2. Penduduk laki-laki di 15 (lima belas) kabupaten/kota di Provinsi Lampung lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin di setiap kabupaten/kota yang mencapai angka diatas 100.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	154 414	135 974	290 388	114
Tanggamus	295 869	271 303	567 172	109
Lampung Selatan	494 080	467 817	961 897	106
Lampung Timur	511 079	487 641	998 720	105
Lampung Tengah	625 215	601 970	1 227 185	104
Lampung Utara	306 501	296 226	602 727	103
Way Kanan	220 719	207 378	428 097	106
Tulang Bawang	219 504	204 206	423 710	107
Pesawaran	217 184	204 313	421 497	106
Pringsewu	196 408	186 693	383 101	105
Mesuji	101 705	92 577	194 282	110
Tulang Bawang Barat	134 611	127 705	262 316	105
Pesisir Barat	77 897	70 515	148 412	110
Bandar Lampung	484 215	476 480	960 695	102
Metro	78 078	77 914	155 992	100
Provinsi Lampung	4 117 479	3 908 712	8 026 191	105

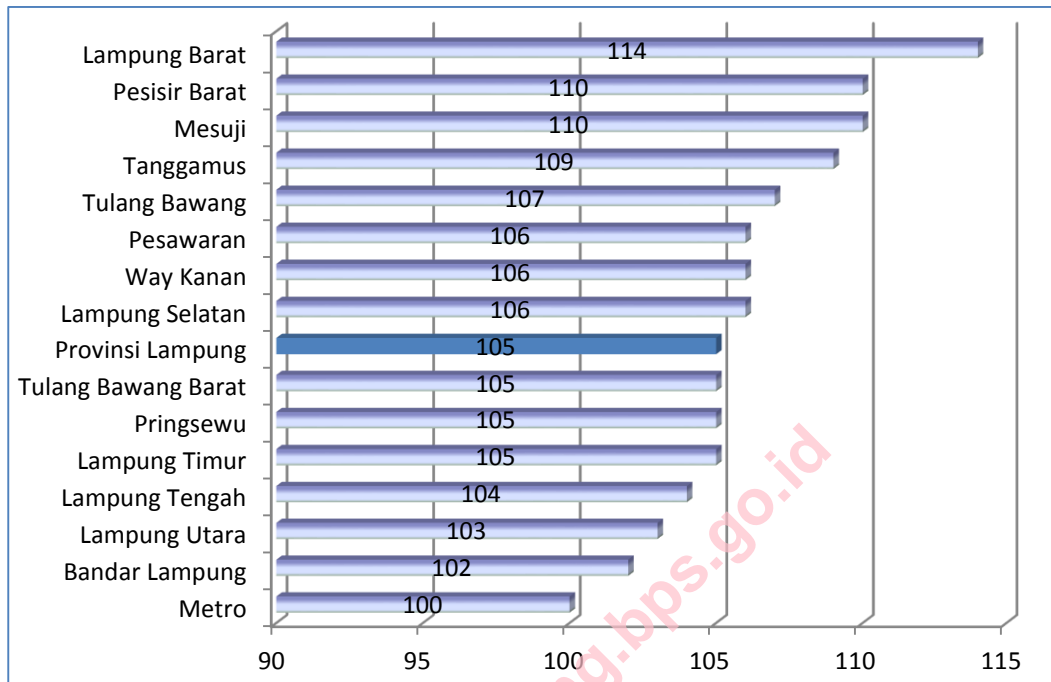
Sumber: BPS Provinsi Lampung

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Secara umum angka sex ratio di Provinsi Lampung pada tahun 2014 menunjukkan angka diatas 100, yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2014 rasio jenis kelamin Provinsi Lampung sebesar 105, maknanya adalah terdapat 105 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Lampung Barat sebesar 114, kemudian Kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat sebesar 110. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah berada di Kota Metro sebesar 100.

Rasio jenis kelamin yang berada diatas angka 100 menarik diteliti lebih jauh penyebabnya, mengingat umumnya penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Ada beberapa kemungkinan seperti tradisi/budaya setempat yang menganggap anak laki-laki lebih diharapkan dibandingkan anak perempuan karena dapat menjaga martabat keluarga, serta adanya daerah-daerah yang berpotensi menarik buruh migran laki-laki, seperti daerah perkebunan, pertambangan atau industri, dapat juga dilihat pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai permasalahan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial, apalagi jika pertumbuhan penduduk terkonsentrasi hanya pada suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jika dikaitkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah ataupun lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah sebesar 34.624 Km² yang terbagi menjadi 15 (empat belas) kabupaten/kota. Wilayah terluas berada di Kabupaten Lampung Timur seluas 5.325,03 Km² sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Metro dengan luas 61,79 Km².

Persebaran penduduk di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi pada wilayah administrasi kota dibandingkan dengan kabupaten, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 yang menggambarkan bahwa kepadatan penduduk pada tahun 2014 di Kota Bandar Lampung dan Kota metro sebesar 3.246 dan 2.525 jiwa per kilometer persegi sedangkan di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, kepadatan tertinggi mencapai 1.374 jiwa per kilometer persegi, yaitu Kabupaten Lampung Selatan.

Kepadatan penduduk di kota jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten, hal ini disebabkan wilayah administrasi kota identik dengan daerah perkotaan yang memiliki fasilitas lebih lengkap yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga menyebabkan penduduk dari daerah lain khususnya perdesaan pindah dan menetap serta melakukan kegiatan usaha di daerah perkotaan.

Daerah perkotaan pada umumnya adalah daerah bukan pertanian, dimana penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa, sedangkan daerah perdesaan pada umumnya daerah yang mempunyai kegiatan utama di bidang pertanian, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam.

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2014 naik menjadi 232 jiwa per kilometer persegi dibandingkan tahun 2013 sebesar 229 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 1.3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014

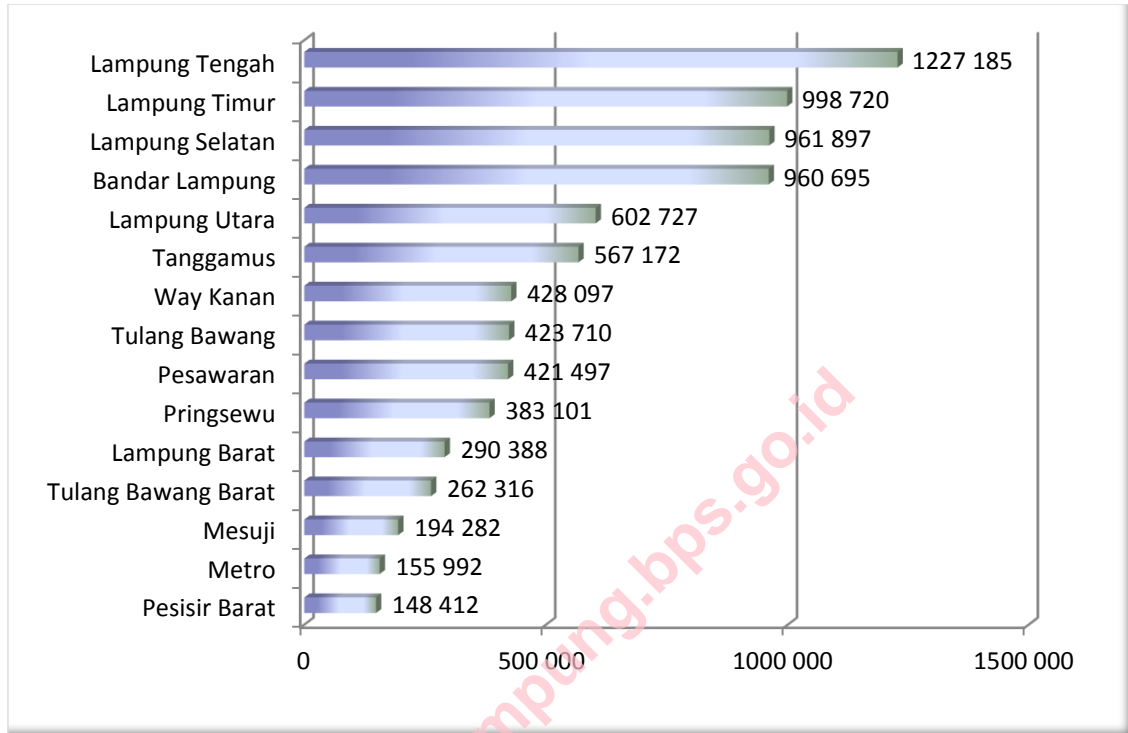
No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km ²)	Penduduk (jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
			2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lampung Barat	2 142,78	284 492	287 588	290 388	136
2	Tanggamus	3 020,64	553 165	560 322	567 172	188
3	Lampung Selatan	700,32	939 390	950 844	961 897	1 374
4	Lampung Timur	5 325,03	977 537	988 277	998 720	188
5	Lampung Tengah	3 802,68	1 201 689	1 214 720	1 227 185	323
6	Lampung Utara	2 725,87	594 881	598 924	602 727	221
7	Way Kanan	3 921,63	418 121	423 195	428 097	109
8	Tulang Bawang	3 466,32	411 705	417 782	423 710	122
9	Pesawaran	2 243,51	411 077	416 372	421 497	188
10	Pringsewu	625,00	375 098	379 190	383 101	613
11	Mesuji	2 184,00	191 314	192 759	194 282	89
12	Tulang Bawang Barat	1 201,00	257 136	259 674	262 316	218
13	Pesisir Barat	2 907,23	145 411	146 929	148 412	51
14	Bandar Lampung	296,00	923 175	942 039	960 695	3 246
15	Metro	61,79	151 117	153 517	155 992	2 525
Provinsi Lampung		34 624,00	7 835 308	7 932 132	8 026 191	232

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Lampung Dalam Angka

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui pula jumlah penduduk menurut kabupaten/kota pada tahun 2012-2014. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 1.227.185 jiwa pada tahun 2014 dengan kepadatan penduduk sebesar 323 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan jumlah

penduduk terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah penduduk sebesar 148.412 jiwa dengan kepadatan penduduk hanya 51 jiwa per kilometer persegi.

Gambar 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Proyeksi Penduduk

1.3. Rasio Beban Ketergantungan

Tabel 1.4 memperlihatkan komposisi penduduk usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun keatas, dari komposisi tersebut diketahui pada tahun 2014 penduduk usia produktif di Provinsi Lampung sebesar 66,75 persen sedangkan penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari usia muda dan tua adalah sebesar 28,38 persen dan 4,87 persen.

Dari komposisi penduduk ini dapat diketahui angka beban tanggungan penduduk yang dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif terhadap kelompok usia tidak produktif.

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia tidak produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa beban ketergantungan di Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 49,81, angka ini memiliki makna bahwa setiap

100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 50 orang penduduk usia tidak produktif, yang 43 orang diantaranya berasal dari usia muda dan 7 orang lainnya berasal dari usia tua.

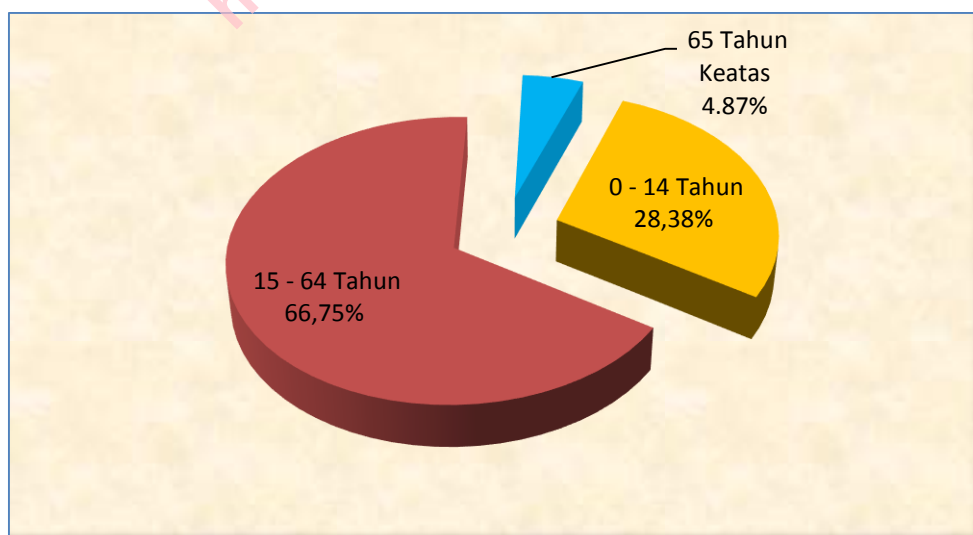
Tabel 1.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan, 2011-2014

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	28,90	66,31	4,79	50,81
2012	28,73	66,47	4,80	50,44
2013	28,56	66,62	4,82	50,10
2014	28,38	66,75	4,87	49,81

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Untuk dapat mengetahui seberapa besar angka beban tanggungan yang berasal dari penduduk usia muda dapat dilakukan dengan membandingkan penduduk muda dengan penduduk produktif, begitu pula dengan angka beban tanggungan usia tua didapat dari perbandingan antara penduduk usia tua dengan penduduk usia produktif.

Gambar 1.3. Komposisi Penduduk Provinsi Lampung, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung

1.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang sifatnya menambah jumlah penduduk. Kelahiran berkaitan dengan tingkat kesuburan seorang wanita untuk dapat bereproduksi. Bertambahnya umur seorang wanita akan berpengaruh terhadap fertilitasnya, semakin berumur seorang wanita maka tingkat fertilitasnya akan semakin menurun. Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak akan cukup besar. Sementara itu, wanita pada kelompok umur 20-24 tahun dan 25-29 tahun merupakan usia paling produktif untuk melahirkan anak.

Dalam fertilitas dikenal beberapa konsep tentang kelahiran, yaitu lahir hidup, lahir mati, dan abortus. Lahir hidup merupakan kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya bayi di dalam kandungan, dimana ketika bayi dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti, bernafas, jantung berdenyut, gerakan-gerakan, dan lain-lain. Lahir mati merupakan kelahiran seorang bayi dari kandungannya yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, sedangkan abortus adalah peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu, abortus ada yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja (spontan).

Angka rata-rata anak lahir hidup merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sejumlah wanita pernah kawin berusia subur 15-49 tahun. Dari Tabel 1.5 diketahui bahwa di Provinsi Lampung rata-rata anak lahir hidup wanita usia 15-49 tahun dari tahun 2012 sampai 2014 tidak mengalami perubahan yaitu 2,27 pada tahun 2012-2014. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2014, rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia 15-49 antara 2 hingga 3 anak.

Anak lahir hidup tertinggi berada di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,49 kemudian Kabupaten Lampung Barat sebesar 2,47 dan Kabupaten Tanggamus sebesar 2,38. Apabila dilihat menurut tipe daerah, anak lahir hidup pada tahun 2014 di daerah perkotaan lebih besar dari pada daerah perdesaan, yaitu sebesar 2,31 dan 2,26 bayi.

Tabel 1.5. Rata-Rata Anak Lahir Hidup Wanita Berusia 15-49 Tahun, 2012-2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	2,60	3,08	2,49	2,43	2,44	2,46	2,44	2,49	2,47
Tanggamus	2,38	2,66	2,36	2,58	2,36	2,38	2,55	2,40	2,38
Lampung Selatan	2,23	2,34	2,53	2,30	2,36	2,47	2,28	2,35	2,49
Lampung Timur	1,98	2,41	2,01	2,11	2,10	2,10	2,10	2,12	2,10
Lampung Tengah	2,19	2,33	2,18	2,20	2,10	2,09	2,20	2,12	2,10
Lampung Utara	2,31	2,32	2,45	2,55	2,41	2,29	2,50	2,39	2,32
Way Kanan	2,20	2,29	2,60	2,31	2,42	2,31	2,30	2,41	2,32
Tulang Bawang	2,70	2,41	2,48	2,31	2,15	2,22	2,36	2,18	2,25
Pesawaran	2,22	2,04	2,03	2,31	2,32	2,39	2,30	2,30	2,36
Pringsewu	2,22	2,20	2,27	2,32	2,45	2,34	2,29	2,36	2,32
Mesuji	2,70	2,52	2,05	2,30	2,22	2,25	2,31	2,23	2,24
Tulang Bawang Barat	2,22	2,20	2,26	2,08	2,23	2,11	2,09	2,23	2,13
Bandar Lampung	2,11	2,27	2,30	2,37	1,84	2,41	2,12	2,27	2,30
Metro	1,96	2,10	2,12	2,05	1,70	1,70	1,96	2,09	2,11
Provinsi Lampung	2,18	2,31	2,31	2,29	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas, karena dapat memperpendek masa reproduksi mereka (Kingsley Davis dan Judith Blake, 1974)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2014 ada kecenderungan semakin berkurangnya perkawinan dini, tahun 2012 wanita yang melakukan perkawinan dibawah usia 16 tahun mencapai 11,33 persen sedangkan tahun 2013 persentase wanita yang melakukan perkawinan dibawah usia 16 tahun turun menjadi 10,55 persen dan pada tahun 2014 turun lagi menjadi 10,42 persen.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2014 ada beberapa kabupaten/kota yang persentasenya naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, Pringsewu, dan Kota Bandar Lampung. Persentase tertinggi berada di Kabupaten Mesuji sebesar 13,80 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kota Metro yang hanya sebesar 3,72 persen.

Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko yang cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan, terutama pada keselamatan ibu dan bayi, selain itu masa reproduksi wanita yang menikah di usia muda akan lebih lama sehingga

mempunyai kemungkinan untuk memiliki anak lebih banyak. Dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi merupakan salah satu cara yang dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang wanita, terutama di daerah pedesaan.

Perkawinan merupakan komitmen bersama yang dibuat dengan tujuan penyatuan pria dan wanita untuk mendapatkan pengakuan hukum, agama dan masyarakat sebagai suami istri maupun orang tua. Di Indonesia ada peraturan batas usia perkawinan yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang (UU), menurut UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Tabel 1.6. Persentase Wanita Perkawinan Pertama Kurang dari 16 Tahun, 2012-2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	2,51	16,01	15,86	17,90	13,96	12,84	16,69	14,12	13,07
Tanggamus	12,28	13,50	10,82	16,96	10,25	12,10	16,22	10,77	11,89
Lampung Selatan	14,82	12,11	11,23	13,00	14,17	14,55	13,47	13,64	13,69
Lampung Timur	12,01	7,95	7,28	10,75	9,81	8,54	10,85	9,68	8,44
Lampung Tengah	8,42	18,80	17,42	10,79	10,51	11,26	10,54	11,36	11,88
Lampung Utara	6,91	5,42	7,28	13,15	12,97	12,19	11,90	11,41	11,19
Way Kanan	13,69	5,53	20,76	10,29	12,86	13,01	10,45	12,51	13,35
Tulang Bawang	3,18	16,31	6,42	15,18	10,70	10,78	13,73	11,45	10,24
Pesawaran	13,95	7,81	5,21	6,95	8,28	7,68	7,52	8,24	7,48
Pringsewu	7,92	9,06	7,50	11,96	7,10	9,22	10,59	7,79	8,62
Mesuji	9,65	8,83	10,53	16,60	16,65	13,90	16,40	16,42	13,80
Tulang Bawang Barat	11,79	6,23	8,79	11,13	11,58	10,40	11,19	11,09	10,26
Bandar Lampung	5,87	4,68	5,52	9,45	26,96	17,02	5,91	4,94	5,64
Metro	4,68	4,93	3,71	11,73	7,10	4,15	4,83	4,98	3,72
Provinsi Lampung	8,01	8,05	7,81	12,41	11,37	11,28	11,33	10,55	10,42

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Keberhasilan program KB dapat pula berdampak pada menurunnya penduduk usia muda (0-14 tahun), dikarenakan pada tingkatan keluarga dapat merencanakan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anak sehingga dapat menekan angka kelahiran. Keberhasilan KB dapat diukur dengan melihat angka prevalensi kontrasepsi (*Contraceptive prevalence rate – CPR*). Angka prevalensi Kontrasepsi adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB. Pasangan usia subur yang dimaksud adalah wanita usia subur (15-49 tahun) yang berstatus kawin.

Tabel 1.7. Angka Prevalensi Kontrasepsi menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	76,36	67,33	76,04	71,41	68,23	73,33	71,79	68,16	73,53
Tanggamus	64,04	62,60	67,44	71,81	71,49	70,58	70,64	70,17	70,09
Lampung Selatan	63,59	61,41	71,22	69,18	71,25	74,35	67,76	68,72	73,58
Lampung Timur	53,59	71,19	71,02	74,93	74,27	70,02	73,21	74,08	70,10
Lampung Tengah	58,90	60,10	55,73	64,76	66,48	71,24	64,23	65,85	69,73
Lampung Utara	49,58	71,75	67,43	67,99	73,42	69,15	64,24	73,08	68,82
Way Kanan	72,11	52,87	83,66	70,31	70,76	70,01	70,38	69,92	70,56
Tulang Bawang	59,35	63,16	74,49	71,47	67,46	67,32	70,00	66,90	68,17
Pesawaran	55,92	79,69	80,95	71,94	74,98	72,60	70,70	75,32	73,27
Pringsewu	62,83	67,65	63,57	66,89	68,10	67,72	65,55	67,94	66,28
Mesuji	79,35	94,15	45,48	72,41	72,49	69,69	72,60	73,08	69,01
Tulang Bawang Barat	62,33	61,64	77,46	70,22	70,50	68,29	69,45	69,70	69,11
Bandar Lampung	60,65	66,53	61,66	72,00	82,04	80,28	60,80	66,72	61,86
Metro	64,51	71,68	61,68	69,05	69,75	71,57	64,61	71,65	61,91
Provinsi Lampung	60,83	66,20	64,82	69,89	70,62	70,79	67,74	69,55	69,36

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa angka prevalensi kontrasepsi di Provinsi Lampung tahun 2014 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, yaitu 69,55 persen pada tahun 2013 dan 69,36 persen tahun 2014. Apabila dilihat menurut wilayah, penggunaan alat/cara KB relatif lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan, tahun 2014 angka prevalensi kontrasepsi di perdesaan sebesar 70,79 persen sedangkan di perkotaan hanya sebesar 64,82 persen.

<http://lampung.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Dengan ketersediaan gizi baik dan seimbang akan mendukung kualitas kesehatan dalam kehidupan manusia. Kesehatan yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun upaya yang dilakukan pemerintah tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka secara mandiri, hanya sedikit yang akan dapat dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia.

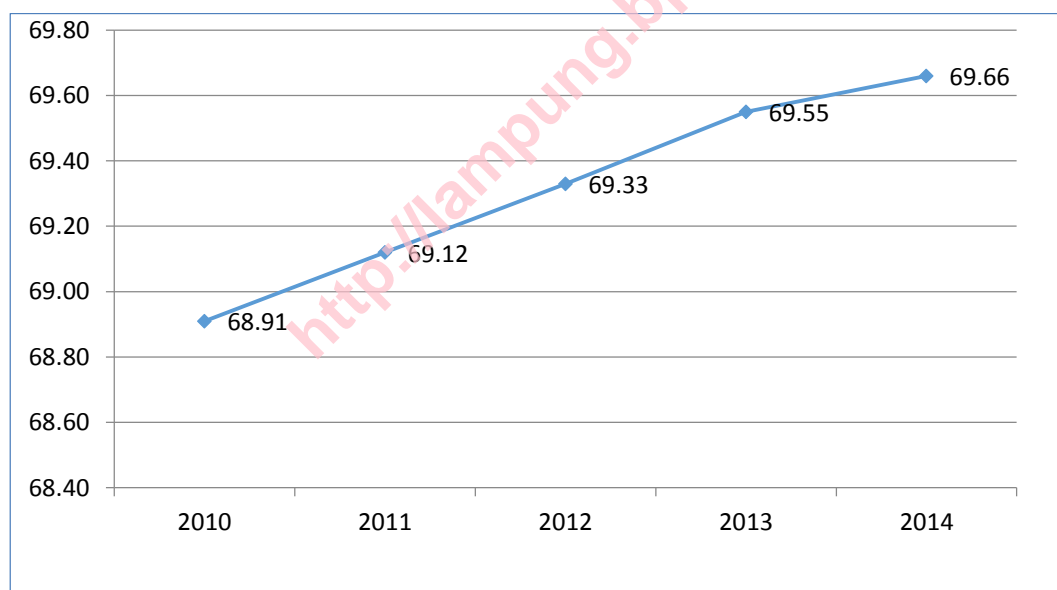
Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya. Upaya yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata dan terjangkau yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Terwujudnya masyarakat Indonesia dengan derajat kesehatan yang tinggi merupakan tujuan pokok pembangunan bidang kesehatan, dimana bisa diketahui dari indikator kesehatan antara lain angka harapan hidup, angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Dalam publikasi ini, penghitungan angka harapan hidup dihitung dengan metode tidak langsung (*indirect method*). Angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 68,91, menjadi 69,66 pada tahun 2014 (Gambar 2.1). Hal tersebut merupakan indikasi bahwa kesehatan masyarakat penduduk Provinsi Lampung relatif meningkat. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh anak-anak yang lahir pada tahun 2014 diperkirakan akan hidup sampai umur 69,66 tahun.

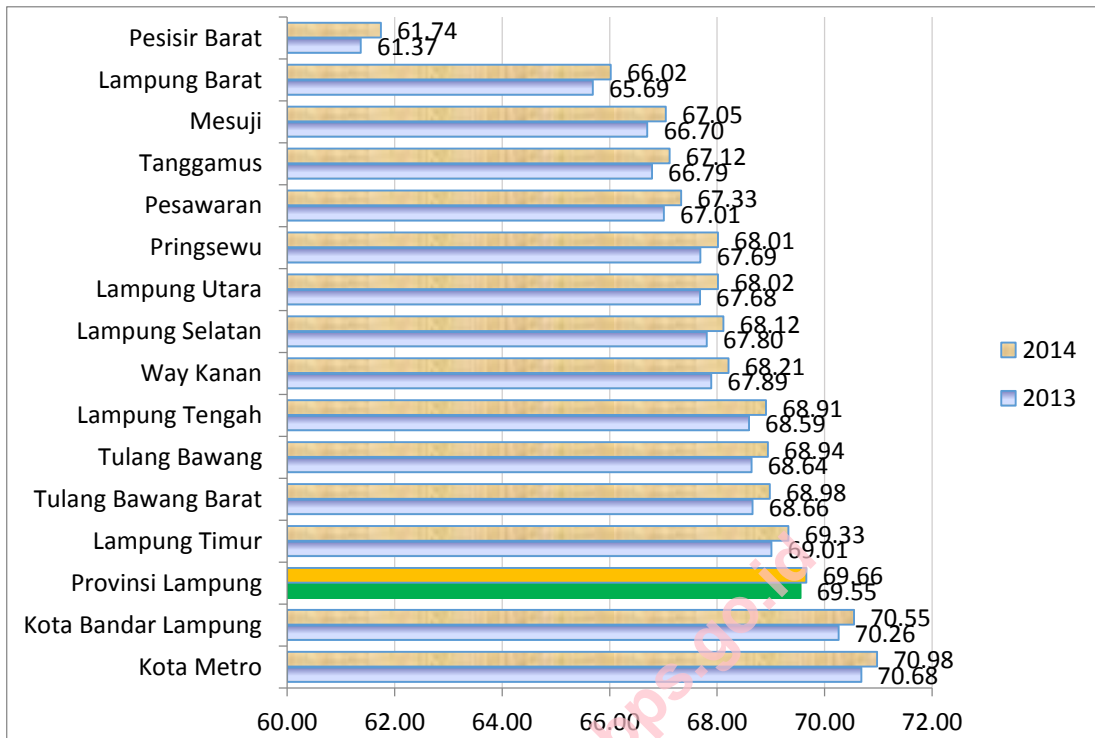
Gambar 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung, 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Publikasi IPM

Sementara, angka harapan hidup menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 2.2. Angka harapan hidup seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dibanding angka harapan hidup tahun sebelumnya, artinya terjadi peningkatan derajat kesehatan penduduk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Barat mempunyai capaian angka harapan hidup yang terendah yaitu 61,74 tahun. Sebaliknya Kota Metro mempunyai capaian angka harapan hidup tertinggi yaitu 70,98 tahun.

Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Publikasi IPM

Gambaran mengenai angka harapan hidup di 15 (lima belas) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.2, terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang angka harapan hidupnya berada di atas angka harapan hidup provinsi yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

2.2. Status Kesehatan

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu, periode yang digunakan adalah sebulan yang lalu sebelum pencacahan. Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik, maka segala aktifitas kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, misalnya pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan yang menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi.

Tabel 2.1 Indikator Kesehatan Provinsi Lampung, 2012-2014

Indikator Kesehatan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Keluhan kesehatan	34,78	23,40	23,00	31,18	30,88	30,61	32,11	28,94	28,63
Angka Kesakitan	17,91	10,44	10,40	14,33	13,78	12,88	15,26	12,91	12,23
Rata-rata Lama sakit	4,89	4,91	4,85	5,42	5,40	5,20	5,26	5,30	5,12

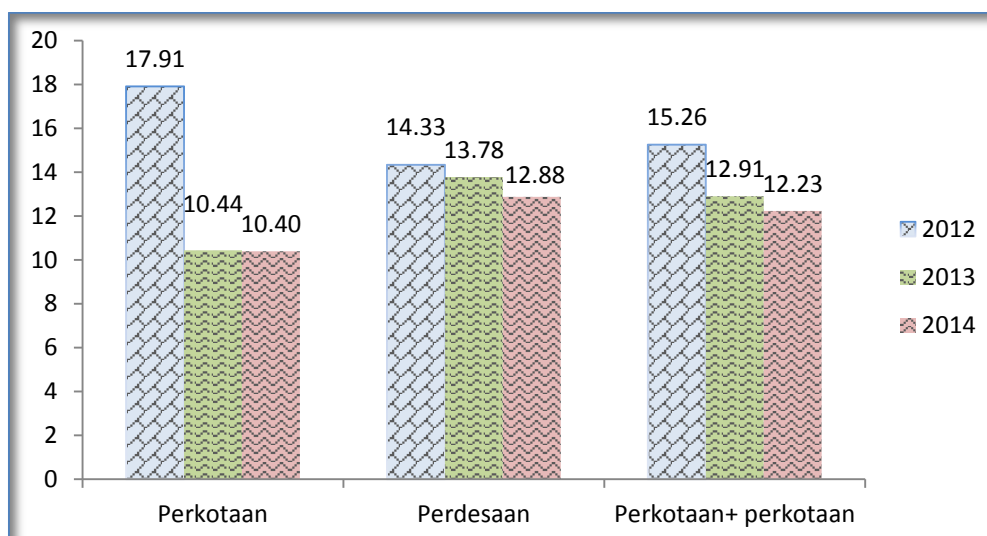
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Berdasarkan data Susenas, angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan di Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tahun 2014 angka keluhan kesehatan sebesar 28,63 persen dan angka kesakitan sebesar 12,23 persen. Angka keluhan kesehatan sebesar 28,63 persen mempunyai makna bahwa ada 28,63 persen penduduk di Provinsi Lampung yang mengalami keluhan kesehatan baik menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari maupun tidak. Sedangkan angka kesakitan penduduk sebesar 12,23 persen mempunyai makna bahwa ada 12,23 persen penduduk di Provinsi Lampung yang mengalami keluhan kesehatan dan karena keluhan kesehatannya itu menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Menurunnya angka kesakitan tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama sakit. Rata-rata lama sakit merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk. Rata-rata lama sakit menunjukkan seberapa lama hari terganggunya aktifitas sehari-hari dikarenakan keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk.

Rata-rata lama sakit tahun 2014 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 5,30 hari menjadi 5,12 hari. Rata-rata lama sakit yang tinggi mempunyai arti bahwa keluhan kesehatan (penyakit) yang dialami penduduk cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Gambar 2.3 Angka Kesakitan (%), 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

2.3. Status Kesehatan Balita

2.3.1. Pemberian ASI

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama bayi dan paling penting bagi proses tumbuh kembang anak karena terbukti memiliki manfaat sangat besar bagi kesehatan. Manfaat tersebut antara lain berguna untuk kecerdasan, pertumbuhan dan perkembangan anak karena ASI mengandung zat-zat gizi yang sangat lengkap dan berkualitas tinggi. Selain itu, ASI juga mengandung zat antibodi (*colostrum*) yang melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh karena itu, ASI sangat dianjurkan agar diberikan kepada bayi berusia 6 bulan pertama secara eksklusif dan selanjutnya bersama dengan makanan tambahan, ASI diberikan hingga usia 2 tahun. Semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi merupakan salah satu indikator kesehatan balita yang dapat diukur.

Tabel 2.2. Persentase Anak Usia 24 – 59 bulan yang Pernah Disusui menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Daerah Tempat Tinggal	Persentase Pemberian ASI		
	2012	2013	2014
(1)	(3)	(4)	(4)
Perkotaan	91,76	91,28	91,13
Perdesaan	96,45	96,09	96,36
Perkotaan + Perdesaan	95,34	94,86	95,07

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2014

Tujuan menyajikan persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui adalah untuk mengetahui berapa persen dari anak-anak yang berusia diatas 2 tahun (24-59 bulan) yang pernah disusui. Dari Tabel 2.2. menunjukkan bahwa dari anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui sebesar 94,86 persen pada tahun 2013 sedikit meningkat menjadi 95,07 persen pada tahun 2014. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui yang tinggal di perdesaan lebih tinggi di bandingkan yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2014 persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui di perdesaan sebesar 96,36 persen sedangkan di perkotaan sebesar 91,13 persen.

Tabel 2.3. Rata-rata Lama Disusui (bulan) menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Daerah Tempat Tinggal	Rata-rata Lama Disusui (bulan)		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	17,66	19,48	19,91
Perdesaan	18,96	18,93	19,28
Perkotaan + Perdesaan	18,66	19,06	19,43

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui, dari tahun ke tahun mengalami perubahan yaitu 18,66 bulan pada tahun 2012 menurun menjadi 19,06 bulan di tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 19,43 bulan. Rata-rata lama bayi disusui di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan, pada tahun 2014 rata-rata

lama bayi disusui sebesar 19,91 bulan di perkotaan sedangkan di perdesaan sebesar 19,28 bulan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang anak usia 24-59 bulan di perkotaan untuk mendapat tingkat imunitas dan pertumbuhan lebih baik dibanding di perdesaan. Hal ini dimungkinkan ibu-ibu yang tinggal di perkotaan mempunyai pengetahuan yang lebih baik dan kesadaran yang tinggi mengenai arti pentingnya ASI bagi pertumbuhan bayi dibandingkan dengan ibu-ibu yang tinggal di pedesaan.

2.3.2. Imunisasi Balita

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Minimal terdapat 5 (lima) jenis imunisasi dasar yang dianjurkan untuk diberikan kepada balita. Kelima jenis imunisasi tersebut antara lain BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B.

Tabel 2.4. Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2012-2014

Jenis Imunisasi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan dan Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BCG	96,58	96,47	97,33	97,69	98,32	97,94	97,42	97,86	97,79
DPT	96,82	95,80	96,39	97,35	97,84	97,57	97,22	97,33	97,29
Polio	96,86	95,57	96,51	97,13	97,84	97,63	97,07	97,27	97,35
Campak / Morbili	93,99	93,56	93,39	96,16	96,54	95,85	95,63	95,79	95,25
Hepatitis B	95,01	94,25	96,02	96,48	96,80	96,57	96,13	96,16	96,44

Sumber :BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

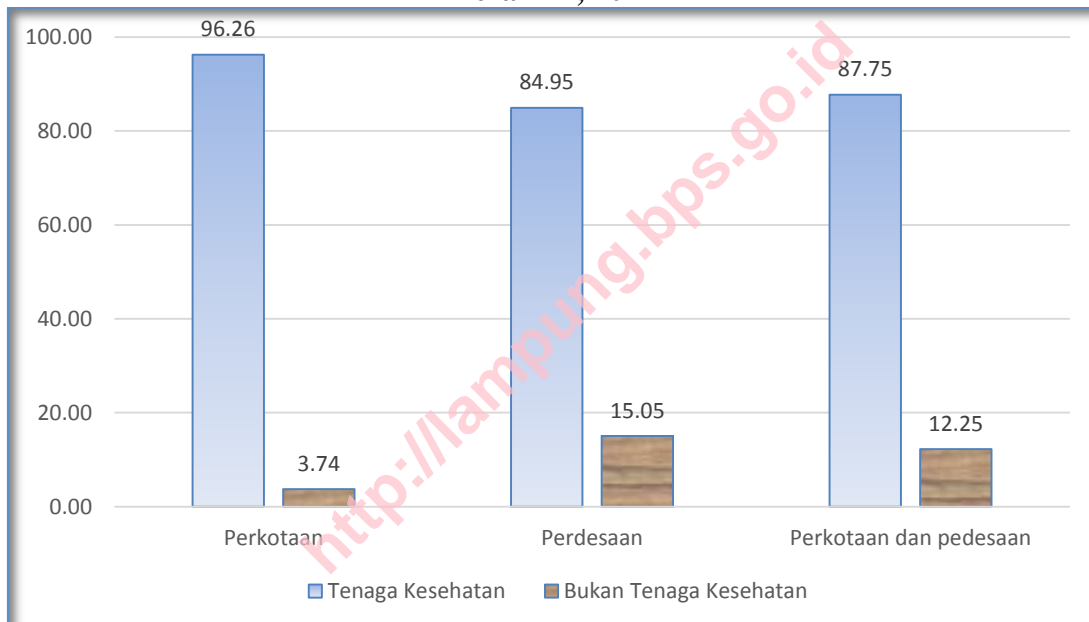
Hasil Susenas tahun 2012 hingga 2014, pada umumnya anak umur 12-59 bulan yang mendapat imunisasi dasar sudah mencapai lebih dari 90 persen dimana balita yang tinggal di perdesaan cenderung lebih banyak mendapat imunisasi dibanding yang tinggal di perkotaan.

2.4. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

2.4.1. Penolong Persalinan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu salah satunya dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Penanganan proses persalinan secara tepat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan. Penolong persalinan akan ideal apabila dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter, bidan atau tenaga medis lain.

Gambar 2.4. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2014

Dari hasil susenas tahun 2014, dapat diketahui bahwa persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dibanding bukan tenaga kesehatan. Di daerah perdesaan maupun perkotaan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dibanding penolong persalinan oleh tenaga bukan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah dibidang pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa sangat berpengaruh positif.

Tabel 2.5. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2012-2014

Penolong Persalinan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tenaga Kesehatan	94,22	96,36	96,26	80,40	83,49	84,95	83,82	86,80	87,75
Dokter	13,72	22,73	18,35	9,47	10,88	9,58	10,52	13,92	11,75
Bidan	79,83	72,73	77,51	70,28	72,34	75,05	72,64	72,44	75,66
Tenaga paramedis lain	0,67	0,90	0,40	0,65	0,27	0,32	0,66	0,44	0,34
Bukan Tenaga Kesehatan	5,78	3,64	3,74	19,60	16,51	15,05	16,18	13,20	12,25
Dukun bersalin	5,29	3,51	3,74	19,35	16,30	14,67	15,88	13,02	11,97
Famili/keluarga/lainnya	0,49	0,13	0,00	0,25	0,21	0,38	0,31	0,19	0,28

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 86,80 persen pada tahun 2013 menjadi 87,75 persen pada tahun 2014. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan peran bidan sebagai penolong persalinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun penolong persalinan oleh dokter selama tahun 2013-2014 mengalami penurunan dari 13,92 persen menjadi 11,75 persen, penurunan ini juga terjadi diperdesaan maupun perkotaan. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan peran bidan.

Akan tetapi, masih ada yang melakukan persalinan dengan memanfaatkan tenaga bukan tenaga kesehatan walaupun persentasenya terus menurun yaitu 13,20 persen tahun 2013 menjadi 11,97 persen tahun 2014. Pemanfaatan tenaga bukan tenaga kesehatan terbanyak berada di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan, yaitu pada tahun 2014 di perkotaan hanya sebesar 3,74 persen sedangkan di perdesaan mencapai 15,05 persen.

Penolong persalinan menurut kabupaten/kota tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran, dimana penolong persalinan oleh bidan sudah diatas 50 persen, dimana Kabupaten Lampung Timur menduduki posisi teratas (83,27 persen). Sementara penolong persalinan oleh dukun bersalin relatif masih tinggi di Kabupaten Mesuji (32,64 persen), Lampung Barat (26,50 persen), dan Way Kanan (23,50 persen), dan sebaliknya di Kota Metro (1,18 persen) penolong persalinan oleh dukun bersalin paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini diduga erat kaitannya dengan kemudahan akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan.

Akses masyarakat dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari fasilitas/tempat dan

tenaga kesehatan sebagai rujukan jika mengalami keluhan sakit sehingga harus berobat jalan/inap.

Akses masyarakat dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan jika mengalami keluhan sakit sehingga harus berobat jalan atau menginap.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk terkait dengan kondisi ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Penduduk perkotaan lebih banyak memanfaatkan fasilitas praktek dokter/poliklinik karena lebih mudah dijangkau dan lebih cepat ditangani. Pada tahun 2014 sebanyak 51,50 persen kunjungan penduduk perkotaan berobat jalan ke praktek tenaga kesehatan, 24,28 persen berobat jalan ke puskesmas/puskesmas pembantu.

Tabel 2.6. Persentase Kunjungan Penduduk yang berobat jalan selama sebulan terakhir menurut fasilitas kesehatan, 2014

Fasilitas Kesehatan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	4,17	2,19	2,63
RS Swasta	4,59	1,87	2,46
Praktek dokter/poliklinik	33,39	18,72	21,94
Puskesmas/Pustu	27,31	23,43	24,28
Praktek Tenaga Kesehatan	31,93	57,01	51,50
Praktek pengobatan tradisional	3,35	2,41	2,61
Dukun Bersalin	0,24	0,67	0,58
Lainnya	3,32	2,02	2,31

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2014

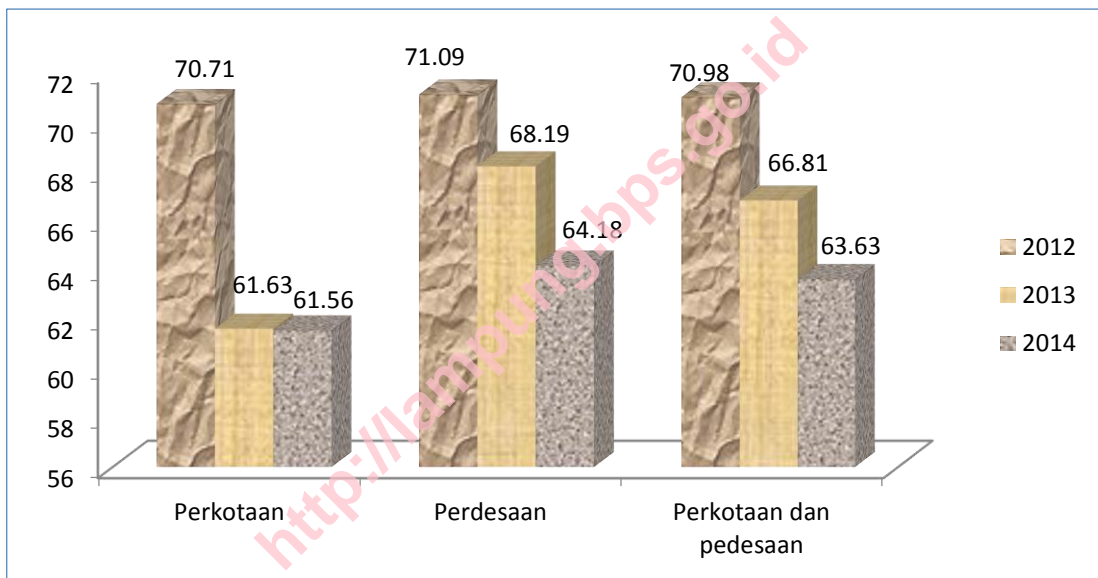
Sementara itu, penduduk perdesaan pada tahun 2014 cenderung memilih tempat berobat ke praktek tenaga kesehatan yaitu sekitar 57,01 persen, diikuti Puskesmas/Pustu (23,43 persen) dan Praktek dokter/poliklinik (18,72 persen), karena ketiga fasilitas tersebut mudah dijangkau oleh penduduk di perdesaan maupun perkotaan. Secara keseluruhan fasilitas berobat jalan yang paling banyak dikunjungi oleh penduduk Lampung adalah praktek tenaga kesehatan sebesar 51,50 persen.

Selain berobat jalan, penduduk yang mengalami keluhan (sakit) dapat mengobati sendiri. Hasil susenas menunjukkan persentase penduduk yang berobat

sendiri sebesar 63,63 persen pada tahun 2014 turun dibandingkan tahun 2013 sebesar 66,81 persen.

Dari Tabel 2.7 terlihat bahwa pada tahun 2014 jenis obat modern lebih banyak dipilih oleh penduduk dalam mengobati sendiri keluhan yang dialami yaitu sebesar 88,73 persen. Jenis obat/cara pengobatan yang kedua terbanyak dipilih oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah obat/cara tradisional sebesar 22,94 persen dan yang terakhir adalah obat/cara lainnya sebesar 9,21 persen

Gambar 2.5. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan dengan Pengobatan Sendiri, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Tabel 2.7. Persentase Penduduk yang berobat Sendiri menurut Jenis Obat/Cara Pengobatan yang digunakan, 2012-2014

Jenis Obat/Cara Pengobatan yang Digunakan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tradisional	26,35	24,59	24,71	26,17	24,98	22,48	26,22	24,91	22,94
Modern	90,01	90,06	89,63	91,16	90,12	88,50	90,84	90,10	88,73
Lainnya	5,40	5,56	5,09	6,90	7,18	10,26	6,48	6,86	9,21

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

<http://lampung.bps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Selain itu pendidikan memiliki peranan strategis sebagai motor penggerak kemajuan pembangunan. Melalui pendidikan, beragam jenis teknologi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk. Sehingga pemerintah selalu mengupayakan program-program peningkatan kualitas pendidikan seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, program biaya sekolah dan berbagai program beasiswa.

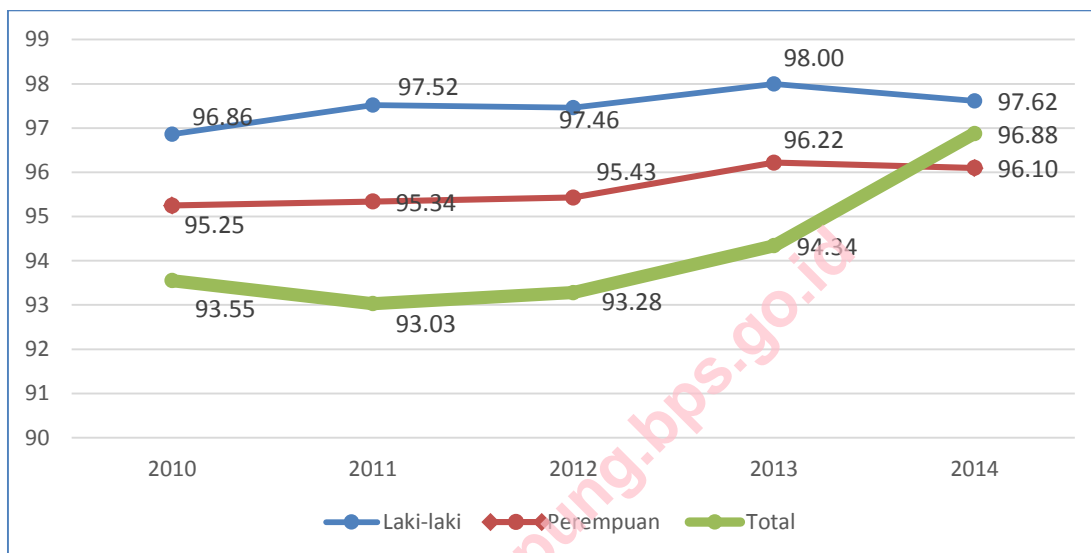
Keberhasilan program-program tersebut dapat diketahui melalui berbagai macam indikator pendidikan. BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menghasilkan beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

3.1. Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 10 tahun keatas atau sering disebut sebagai Angka Melek Huruf (AMH). AMH adalah angka yang dipakai untuk menyatakan persentase penduduk umur 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis baik itu menggunakan huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. Angka ini bermanfaat untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca dan menulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH mencerminkan sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang melek huruf meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 3.1). Peningkatan AMH tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pemberantasan buta huruf, melalui program pemberantasan buta aksara dan program keaksaraan fungsional. Selain itu juga didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas, 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2010-2014

Tabel 3.1. Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Kelompok Umur	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan dan Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10-14	99,82	98,77	99,80	98,98	99,21	99,08	99,18	99,11	99,26
15-19	99,49	99,96	100,00	99,30	99,58	99,89	99,35	99,69	99,92
20-24	99,67	99,95	100,00	99,19	99,44	99,95	99,33	99,59	99,97
25-34	99,54	99,83	99,82	99,67	99,55	99,40	99,63	99,63	99,50
35-54	98,47	98,61	99,30	95,75	96,56	97,51	96,46	97,09	97,98
55+	87,76	87,34	91,09	74,38	79,33	81,41	77,61	81,30	83,79
10 +	97,72	97,72	98,55	94,62	95,68	96,28	95,43	96,22	96,88
Laki-laki	98,99	98,97	98,89	96,94	97,66	97,18	97,46	98,00	97,62
Perempuan	96,42	96,45	98,21	92,14	93,57	95,33	93,28	94,34	96,10

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa AMH penduduk Provinsi Lampung usia 10 tahun keatas, baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal dipertanian maupun perdesaan mencapai lebih dari 90 persen. Jika dilihat menurut kelompok umur, penduduk usia 10-34 tahun memiliki AMH hampir 100 persen,

penduduk usia 35-54 tahun di atas 95 persen, sedangkan untuk penduduk usia 55 tahun keatas angka AMH nya masih di bawah 90 persen. Secara umum dari tahun 2012 hingga 2014, AMH 10 tahun ke atas di perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan, namun demikian angka AMH di perdesaan secara perlahan terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam hal menggalakkan program pemberantasan buta aksara dan program keaksaraan fungsional khususnya bagi penduduk usia 35 tahun keatas di daerah perdesaan menunjukkan pengaruh yang positif.

AMH Penduduk usia 10 tahun keatas tahun 2014 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran. AMH Kota Bandar Lampung menempati posisi tertinggi yaitu 99,18 persen yang berarti dari 100 penduduk Bandar Lampung yang berusia 10 tahun keatas, terdapat 99 orang telah melek huruf, posisi berikutnya Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro masing-masing sebesar 98,37 persen dan 98,23 persen, sebaliknya Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten dengan AMH terendah yaitu 95,15 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, secara umum AMH penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibanding AMH penduduk perempuan, namun ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang AMH penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Selisih tertinggi AMH antara laki-laki dan perempuan berada di Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 4,46 persen. Sebaliknya Kota Metro memiliki selisih terkecil yaitu 0,09 persen. Hal ini masih memperlihatkan adanya kesenjangan gender, artinya masih kurangnya kesetaraan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

3.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Upaya pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengejar ketertinggalan masyarakat di bidang pendidikan dilakukan dengan berbagai upaya pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun serta meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, di mulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk

mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang masih sekolah, terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur usia yang sama. Kelompok umur yang dipakai untuk melihat angka partisipasi sekolah adalah kelompok umur yang ditujukan untuk program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dan kelompok umur pada jenjang pendidikan menengah 16-18 tahun. APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014

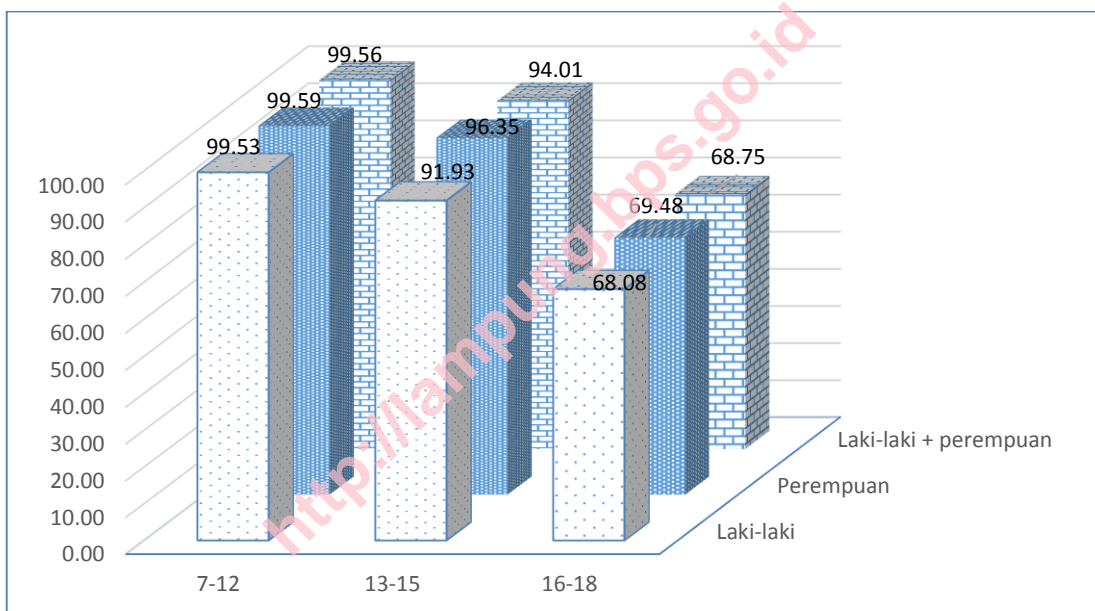
Kelompok Usia Sekolah	Jenis Kelamin	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 – 12	Laki-laki + Perempuan	98,64	99,03	99,56
	Laki-laki	98,46	99,04	99,53
	Perempuan	98,82	99,02	99,59
13 – 15	Laki-laki + Perempuan	90,00	91,06	94,01
	Laki-laki	88,02	89,09	91,93
	Perempuan	92,04	93,30	96,35
16 – 18	Laki-laki + Perempuan	60,43	64,41	68,75
	Laki-Laki	58,34	64,67	68,08
	Perempuan	62,67	64,14	69,48

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa penduduk usia 7-12 tahun pada Tahun 2014 yang masih sekolah sebesar 99,56 persen artinya masih ada 0,44 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah. Demikian pula dengan penduduk usia 13-15 yang tidak sekolah sebesar 5,99 persen. Sementara penduduk usia 16-18 tahun yang belum menikmati bangku sekolah yaitu 31,25 persen. Walaupun APS 7-12 tahun

dan APS 13-15 tahun belum mencapai 100 persen namun secara perlahan menunjukkan peningkatan. Seperti diketahui bahwa kedua kelompok usia ini merupakan sasaran program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Berbagai program bantuan pemerintah telah digulirkan kepada siswa yang dianggap miskin melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Belum optimalnya capaian APS menunjukkan masih adanya kasus putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan masih ada penduduk yang tidak pernah sekolah.

Gambar 3.2. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2014

Jika dilihat dari sudut gender, tidak terdapat perbedaan yang berarti pada partisipasi sekolah laki-laki dengan perempuan. Penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan sama untuk bersekolah. Hasil Susenas tahun 2013 mengindikasikan bahwa APS laki-laki dan APS perempuan relatif sama di semua jenjang pendidikan.

Disparitas gender pada level partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun cukup kecil yaitu laki-laki sebesar 99,53 persen dan perempuan sebesar 99,59 persen. Namun di usia 13-15 tahun angka partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Biasanya semakin tinggi jenjang pendidikan disparitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin tinggi

3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK mencerminkan partisipasi dan akses penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sebagai contoh terdapat anak-anak dibawah usia 6 tahun tetapi sudah bersekolah di tingkat SD atau anak usia 13 tahun masih bersekolah di SD.

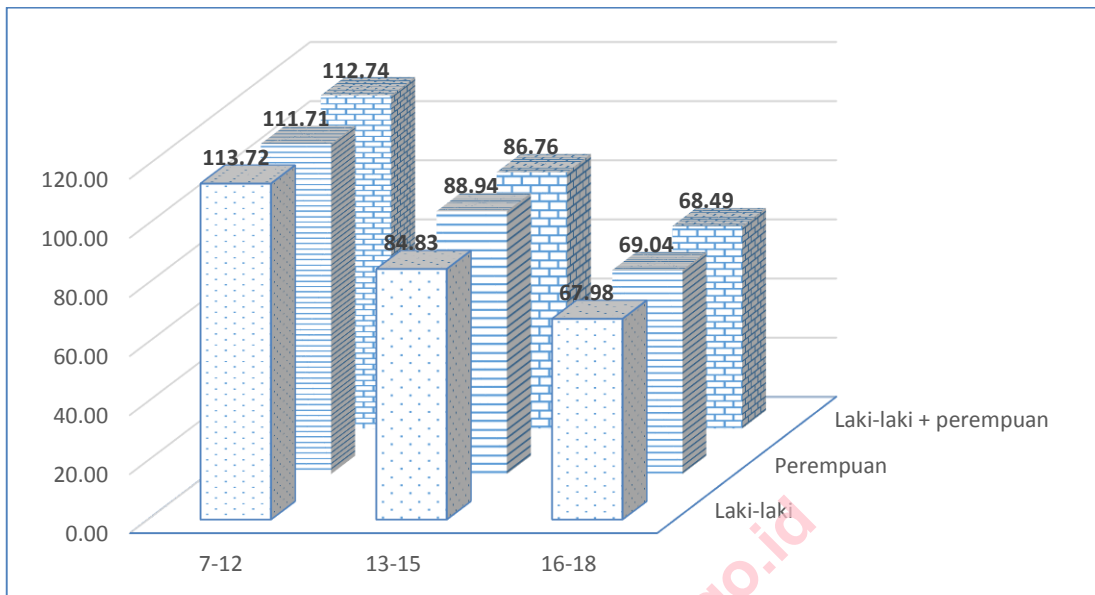
Tabel 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	Laki-laki + Perempuan	106,57	110,73	112,74
	Laki-laki	107,10	112,54	113,72
	Perempuan	106,00	108,97	111,71
SLTP	Laki-laki + Perempuan	93,41	85,47	86,76
	Laki-laki	90,67	82,81	84,83
	Perempuan	96,23	88,51	88,94
SLTA	Laki-laki + Perempuan	62,03	63,81	68,49
	Laki-Laki	59,16	62,44	67,98
	Perempuan	65,09	65,24	69,04

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Pada Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014, anak yang bersekolah pada jenjang SD sebesar 112,74 persen artinya partisipasi dan akses penduduk bersekolah SD lebih dari 100 persen karena terdapat anak yang belum mencukupi umur (usia dibawah 7 tahun) sudah bersekolah SD atau anak yang melebihi umur yang seharusnya (usia lebih dari 12 tahun) masih duduk di bangku SD.

Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2014

Berdasarkan jenis kelamin, APK laki-laki pada jenjang SD lebih tinggi dibanding APK perempuan, sebaliknya pada jenjang SLTP dan SLTA APK laki-laki lebih rendah dibanding APK perempuan.

3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM untuk mengukur anak yang bersekolah tepat pada waktu dengan kata lain APM dapat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	Laki-laki + Perempuan	93,50	97,41	97,98
	Laki-laki	93,55	97,49	98,03
	Perempuan	93,46	97,32	97,93
SLTP	Laki-laki + Perempuan	72,08	74,96	77,98
	Laki-laki	69,52	71,40	75,10
	Perempuan	74,71	79,02	81,23
SLTA	Laki-laki + Perempuan	46,14	53,48	57,64
	Laki-Laki	44,54	52,81	56,03
	Perempuan	47,86	54,18	59,39

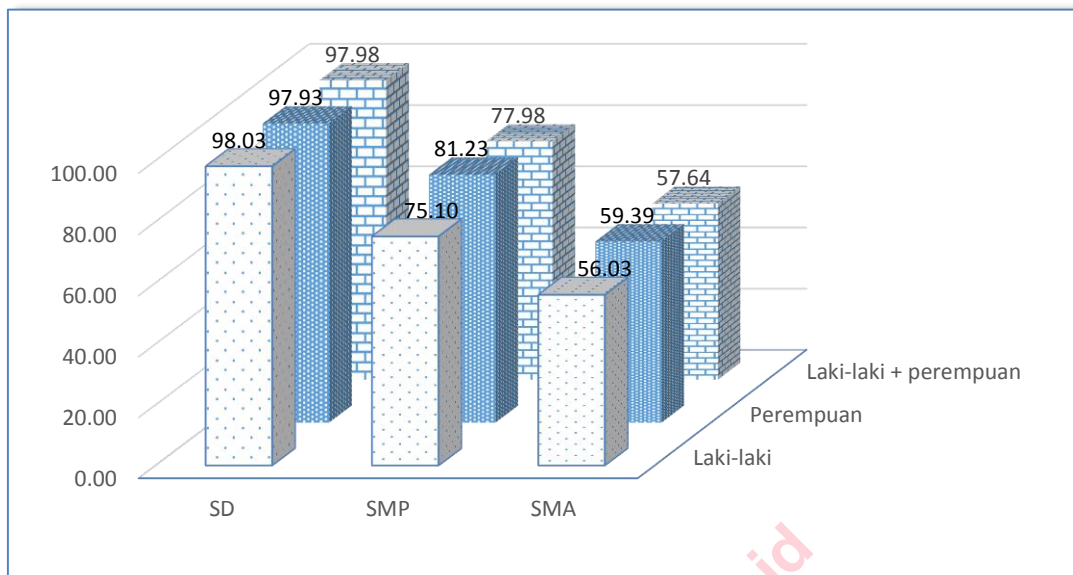
Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Nilai APM selalu lebih rendah dibanding nilai APK, hal ini disebabkan oleh murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, lulus lebih awal (kelas akselerasi), menunda/mempercepat saat mulai sekolah. Keterbatasan APM adalah tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 tahun, lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat, selain itu referensi tanggal masuk ke pendidikan dasar tidak bertepatan dengan tanggal lahir dari semua kelompok yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada jenjang pendidikan.

Pada Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014, anak yang bersekolah pada jenjang SD sebesar 97,98 persen artinya partisipasi dan akses penduduk bersekolah SD sesuai dengan kelompok umur yang direkomendasikan (7-12 tahun) atau bersekolah tepat waktu sebesar 97,98 persen. Demikian halnya dengan yang bersekolah tepat waktu SLTP sebesar 77,98 persen dan bersekolah tepat waktu SLTA sebesar 57,64 persen (Tabel 3.4).

Seperti halnya dengan APK, APM menurut jenis kelamin mempunyai pola yang sama yaitu APM laki-laki pada jenjang SD lebih tinggi dibanding APM perempuan, sebaliknya pada jenjang SLTP dan SLTA APM laki-laki lebih rendah dibanding APM perempuan (Gambar 3.4).

Gambar 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Janis Kelamin, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2014

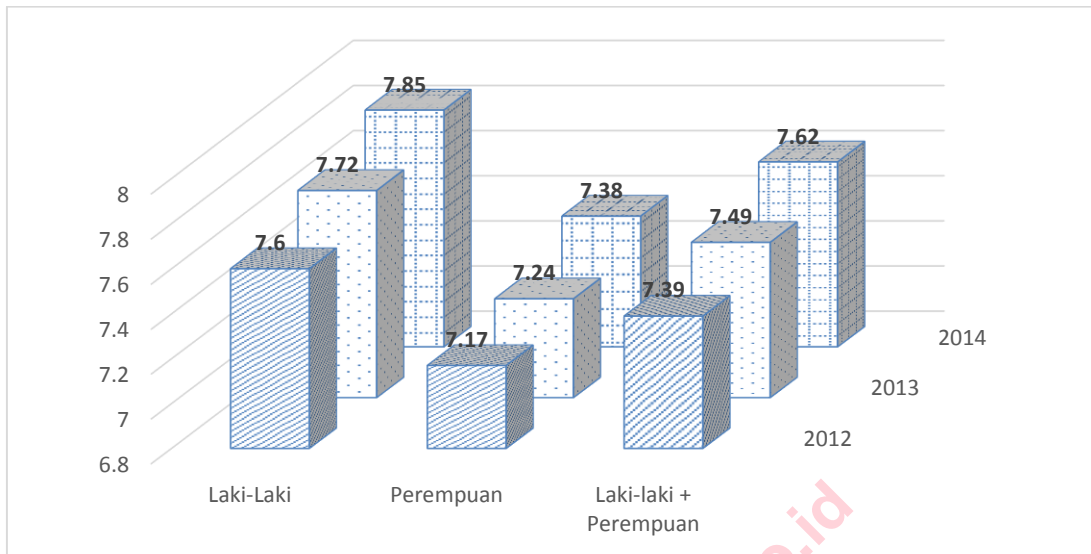
3.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun.

Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang telah dicanangkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun atau lebih.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2014 masih sekitar 7 tahun yang artinya penduduk di Provinsi Lampung rata-rata menikmati pendidikan sampai kelas 1 SLTP (Gambar 3.5). Hal ini berarti, program wajib belajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Akan tetapi rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014 baik perempuan maupun laki-laki.

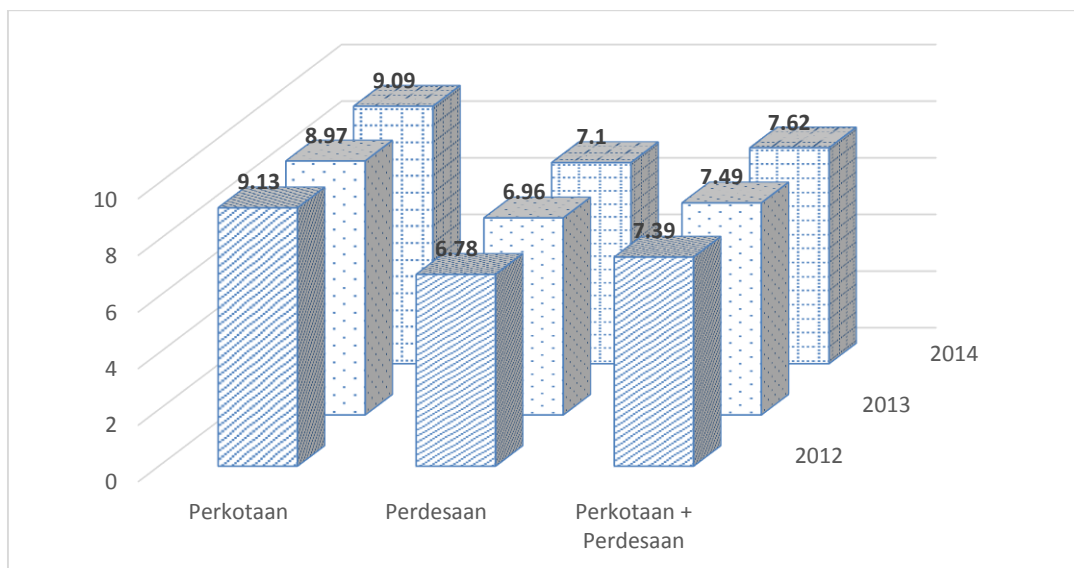
Gambar 3.5. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 10 tahun keatas menurut Jenis Kelamin, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, rata-rata lama sekolah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, tahun 2014 rata-rata lama sekolah di perkotaan sebesar 9,09 tahun sebaliknya penduduk yang tinggal di daerah perdesaan masih 7,10 tahun. Hal ini berarti penduduk perkotaan telah memperoleh kesempatan lebih lama dalam pendidikan dibanding penduduk perdesaan.

Gambar 3.6. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 10 tahun Keatas menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran dimana Kota Metro dan Kota Bandar Lampung memiliki rata-rata lama sekolah diatas 9 tahun, yaitu sebesar 9,91 dan 9,55 tahun. Artinya penduduk di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SLTP. Berbeda halnya dengan Kabupaten Mesuji yang hanya sebesar 6,50 tahun, artinya penduduk di kabupaten ini belum dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.

3.4. Pendidikan yang Ditamatkan

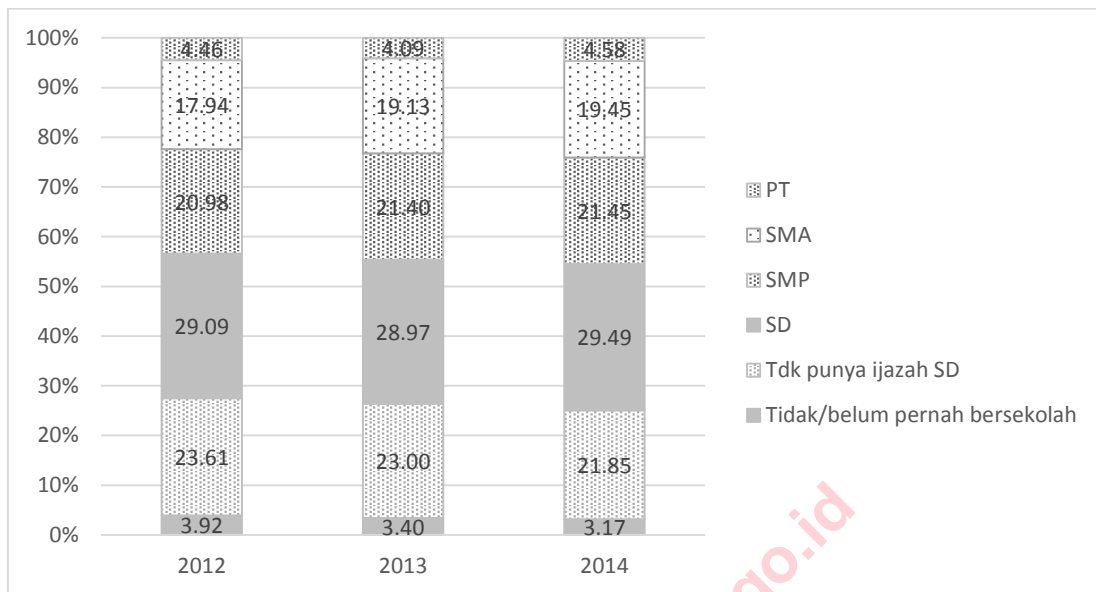
Belum tercapainya target dari program wajib belajar 9 tahun juga tercermin dari data persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada Tabel 3.5 tampak bahwa lebih dari 50 persen penduduk Lampung tidak mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi. Komposisi yang lebih tepat yaitu 25,02 persen penduduk belum tamat SD, dimana di dalamnya terdapat 3,17 persen penduduk yang belum/tidak pernah sekolah. Kemudian sebesar 29,49 persen penduduk mampu menamatkan pendidikan hanya sampai tingkat SD. Sedangkan yang mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi sebesar 21,45 persen untuk jenjang SLTP, 19,45 persen untuk jenjang SLTA dan 4,58 persen untuk jenjang di atas SLTA atau perguruan tinggi.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, 2012-2014

Jenjang Pendidikan yang ditamatkan	2012			2013			2014		
	L	P	L + P	L	L	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak Pernah Sekolah	1,97	5,99	3,92	1,81	5,09	3,40	1,65	4,78	3,17
Belum tamat SD	23,83	23,38	23,61	22,14	23,90	23,00	20,98	22,76	21,85
Sekolah Dasar	29,19	28,98	29,09	29,58	28,34	28,97	29,99	28,97	29,49
SLTP	21,29	20,65	20,98	22,01	20,75	21,40	21,85	21,04	21,45
SLTA	19,54	16,25	17,94	20,57	17,62	19,13	21,21	17,59	19,45
Diatas,SLTA	4,18	4,76	4,46	3,89	4,31	4,09	4,31	4,87	4,58

Sumber:.,BPS,Provinsi,Lampung, Susenas, 2012-2014

Gambar 3.7. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun Keatas, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012-2014

Dilihat dari komposisi jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk selama tahun 2012-2014, tampak menunjukkan perkembangannya yang semakin membaik namun perubahannya tidak cukup signifikan. Penduduk 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun sebaliknya penduduk yang menamatkan pendidikan menengah dan tinggi semakin meningkat.

Persentase penduduk 10 tahun keatas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran. Penduduk yang menamatkan pendidikan menengah dan tinggi (SLTP keatas) di Kota Bandar Lampung dan Metro lebih dari 60 persen sedangkan di kabupaten lain kurang dari 50 persen bahkan Kabupaten Mesuji hanya 33,98 persen.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Salah satu aspek penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengamati kondisi ketenagakerjaan. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Banyaknya penduduk yang bekerja sangat terkait dengan kemiskinan suatu daerah karena dapat menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung dapat menunjukkan pula banyaknya penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, banyaknya pengangguran menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Indikator kondisi ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh kedua indikator tersebut adalah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) kondisi bulan Agustus baik pada tahun 2012, 2013, dan 2014.

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi disuatu daerah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah Angkatan Kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Adapun formulasi untuk menghitung TPAK adalah :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100 \%$$

Berbeda dengan TPAK, TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapat pekerjaan. Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$$

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	62,68	60,60	61,74	11,76	8,97	6,99
Perdesaan	67,71	66,39	68,86	2,96	4,62	4,08
Perkotaan + Perdesaan	66,40	64,84	66,99	5,13	5,69	4,79

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas 2012-2014

Pada kondisi Agustus 2014, TPAK terlihat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. TPAK tahun 2013 sebesar 64,84 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 66,96 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPAK perdesaan lebih tinggi dibanding TPAK perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi lebih banyak berada di perdesaan.

Beda halnya dengan TPAK, tahun 2014 TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2013 yaitu 5,69 persen menjadi 4,79 persen di tahun 2014. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, TPT perkotaan jauh lebih tinggi dari perdesaan, yaitu TPT perkotaan pada tahun 2014 mencapai 6,99 persen sedangkan pada perdesaan hanya 4,08 persen.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa , menurut jenis kelamin, pada kondisi Agustus 2014, TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya, yaitu untuk TPAK laki-laki tahun 2013 sebesar 83,81 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 85,37 persen. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan TPAK tahun 2013 sebesar 44,83 persen naik menjadi 47,62 persen pada tahun 2014.

Tabel 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) menurut Jenis Kelamin, 2012-2014

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	84,55	83,81	85,37	3,57	4,98	4,09
Perempuan	47,24	44,83	47,62	8,08	7,10	6,10
Laki-laki + Perempuan	66,40	64,84	66,99	5,13	5,69	4,79

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas 2012-2014

TPT laki-laki mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014, seperti pada Tabel 4.2 ditunjukkan bahwa TPT laki-laki tahun 2013 sebesar 4,98 persen dan tahun 2014 turun menjadi 4,09 persen. Sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan yaitu dari 7,10 persen tahun 2013 menjadi 6,10 persen di tahun 2014.

Jika dibandingkan tahun 2012-2014 TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan TPT perempuan.. Pada keadaan Agustus 2014, TPT perempuan sebesar 6,10 persen, sementara TPT laki-laki sebesar 4,09 persen. Data ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja lebih banyak dimanfaatkan oleh laki-laki daripada perempuan

Tabel 4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) menurut Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
Lampung Barat	74.71	2.18
Tanggamus	71.34	4.60
Lampung Selatan	64.73	6.05
Lampung Timur	65.64	5.00
Lampung Tengah	71.31	2.48
Lampung Utara	70.42	5.57
Way Kanan	71.27	3.35
Tulang Bawang	67.43	4.15
Pesawaran	65.44	8.54
Pringsewu	61.66	3.78
Mesuji	65.65	0.81
Tulang Bawang Barat	65.53	5.13
Bandar Lampung	59.58	8.29
Metro	60.32	4.23
Provinsi Lampung	66.99	4.79

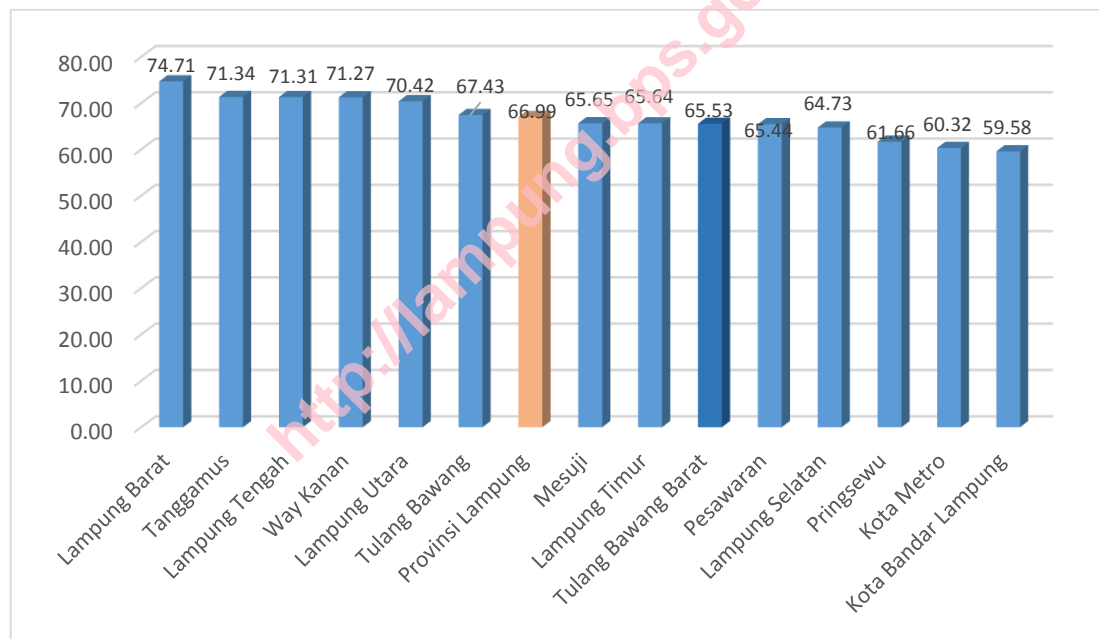
Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas Agustus 2014

Tabel 4.3 menunjukkan TPAK dan TPT dirinci menurut kabupaten/kota di provinsi Lampung, pada keadaan Agustus 2013, Kabupaten Lampung Barat mempunyai angka TPAK tertinggi (74,71 persen) disusul Kabupaten Tanggamus (71,34 persen) dan Kabupaten Lampung Tengah (71,31 persen). Sementara daerah yang mempunyai angka TPAK terendah adalah Kota Bandar Lampung (59,58 persen), Kota Metro (60,32 persen), dan Kabupaten Pringsewu (61,66 persen).

Untuk 3 (tiga) kabupaten dengan TPT terendah berada di Kabupaten Mesuji (0,81 persen), Kabupaten Lampung Barat (2,18 persen), dan Kabupaten Lampung Tengah (2,48 persen). Sedangkan TPT tertinggi berada di Kabupaten Pesawaran (8,54 persen), diikuti Kota Bandar Lampung (8,29 persen), dan Kabupaten Lampung Selatan (6,05 persen). Keadaan ini masih memperlihatkan bahwa pada umumnya proporsi pengangguran di daerah perkotaan dan pinggiran kota relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi di daerah pedesaan.

Gambar 4.1 memperlihatkan TPAK mulai dari wilayah yang terendah sampai yang tertinggi, serta posisinya dilihat dari angka provinsi. Kota Bandar Lampung , Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji merupakan wilayah yang TPAKnya lebih rendah dibandingkan dengan TPAK Provinsi Lampung (66,99 persen). Sementara Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tulang Bawang merupakan wilayah dengan TPAK lebih tinggi dibandingkan TPAK Provinsi Lampung.

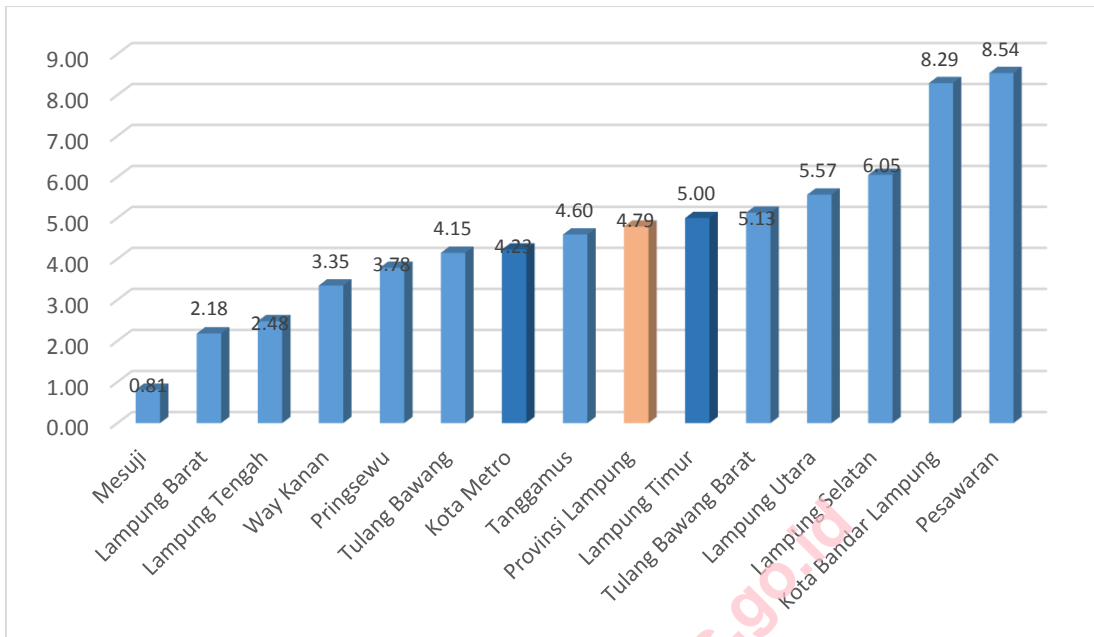
Gambar 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Sakernas Agustus 2014

Gambar 4.2 juga memperlihatkan secara lengkap wilayah-wilayah di provinsi Lampung yang TPT-nya di bawah angka TPT provinsi Lampung. Kabupaten/kota yang memiliki TPT lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi (4,79 persen) antara lain Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, dan Kabupaten Tanggamus. Sementara Kabupaten/kota yang memiliki TPT lebih tinggi dari Provinsi Lampung antara lain Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung, 2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Sakernas Agustus 2014

BAB V
TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1 Taraf Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) menetapkan patokan kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari masing-masing 2000 kkal dan 52 gram protein.

Tabel 5.1. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari, 2010-2014

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2010	1844,40	1994,09	1953,67
2011	1 781,18	2 031,53	1 967,20
2012	1 754,44	1924,28	1 880,60
2013	1 666,22	1880,24	1 825,27
2014 (Maret)	1 703,64	1 766,52	1 750,15
2014 (Sept)	1 694,66	1 770,13	1 750,45
Protein (gram)			
2010	52,48	52,89	52,78
2011	51,43	53,30	52,82
2012	50,70	51,03	50,95
2013	46,42	50,11	49,13
2014 (Maret)	48,72	46,36	46,97
2014 (Sept)	48,26	46,45	46,92

Sumber: BPS, Susenas Panel 2010, Susenas Triwulan I 2011-2014 dan Susenas September 2014

Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari, maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Lampung pada September 2014 masih berada di bawah standar kecukupan yakni 1.750,45 kkal. Begitu pula rata-rata konsumsi protein masih berada di bawah standar kecukupan yakni sebesar 46,92 gram protein.

Kondisi September 2014 bila dibandingkan dengan Maret 2014, konsumsi kaloripenduduk Lampung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, yaitu 1.750,15 kkal menjadi 1.750,45 kkal sedangkan konsumsi protein mengalami penurunan dari 46,97 gram menjadi 46,92 gram.

Pada periode yang sama, di daerah perkotaan konsumsi kalori mengalami penurunan yaitu 1.703,64 kkal menjadi 1.694,66 kkal sebaliknya di daerah perdesaan mengalami peningkatan yaitu 1.766,52 kkal menjadi 1.770,13 kkal.

Sama halnya dengan konsumsi kalori, pola yang sama terjadi pada konsumsi protein dimana di daerah perkotaan konsumsi protein mengalami penurunan dan di daerah perdesaan mengalami peningkatan, yaitu di perkotaan pada Maret 2014 sebesar 48,72 gram menjadi 48,26 gram di September 2014, sedangkan di daerah perdesaan Maret 2014 sebesar 46,36 gram menjadi 46,45 gram di September 2014.

Penduduk di daerah perdesaan mengkonsumsi energi lebih banyak dibandingkan penduduk di daerah perkotaan. Beda halnya dengan konsumsi protein, penduduk di daerah perdesaan mengkonsumsi protein lebih rendah dibanding penduduk yang tinggal di perkotaan.

5.2 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Data pengeluaran/konsumsi (dalam rupiah) yang dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran konsumsi penduduk. Pola pengeluaran konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat

konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.2. Konsumsi Rata-rata dan Persentase Konsumsi Makanan / Non Makanan per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, 2010-2014

Tahun	Pengeluaran per Kapita Sebulan					
	Nominal (Rp)			Persentase		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	219 887	191 716	411 603	53,42	46,58	100,00
2011	261 519	228 662	490 181	53,35	46,65	100,00
2012	283 870	233 840	517 710	54,83	45,17	100,00
2013	314 408	259 226	573 634	54,81	45,19	100,00
2014 (Maret)	340 844	287 666	628 510	54,23	45,77	100,00
2014 (Sept)	330 325	287 442	617 768	53,47	46,53	100,00

Sumber: BPS, Susenas Panel 2010, Susenas Triwulan I 2011-2014 dan Susenas September 2014

Pada tabel 5.2 terlihat bahwa terjadi penurunan pengeluaran rata-rata nominal baik pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan dari Maret 2014 ke September 2014. Persentase pengeluaran untuk makanan dari tahun ke tahun selalu berada diatas 50 persen sebaliknya pengeluaran bukan makanan kurang dari 50 persen. Hal ini menunjukkan terjadi kecenderungan bahwa konsumsi makanan masih menjadi prioritas penduduk Lampung dalam membelanjakan uangnya.

Pengeluaran konsumsi penduduk dapat di golongan menjadi beberapa kelompok pengeluaran, yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengeluaran di masing-masing kelompok pengeluaran. Pada tabel 5.3 memperlihatkan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran per kapita penduduk semakin tinggi pula pengeluaran untuk bukan makanan.

Hal ini wajar karena pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Sejalan dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun

akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Tabel 5.3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (%), 2014

Golongan pengeluaran per kapita sebulan	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)
Kurang dari 149 999	69,12	30,88
150 000 - 199 999	68,64	31,36
200 000 - 299 999	64,71	35,29
300 000 - 499 999	64,49	35,51
500 000 - 749 999	58,42	41,58
750 000 - 999 999	54,29	45,71
1 000 000 dan lebih	37,60	62,40
Rata-rata per kapita	53,47	46,53

Sumber: BPS, Susenas September 2014

5.3 Distribusi Pendapatan

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan Indeks Gini atau Gini Ratio dan kriteria Bank Dunia. Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi 3 kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan.

Tabel 5.4. Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita dan Indeks Gini, 2010-2015

Tahun	40 % ber-pengeluaran rendah	40 % ber-pengeluaran sedang	20 % ber-pengeluaran tinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	20,08	37,33	42,60	0,36
2011	19,27	35,68	45,06	0,37
2012	19,65	36,17	44,18	0,36
2013	20,09	35,05	44,86	0,36
2014	20,32	35,94	43,74	0,35
2015	19,72	34,52	45,76	0,38

Sumber: BPS, Susenas Panel 2010 dan Susenas Triwulan I 2011-2015

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh <12, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi
- b. Memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang
- c. Memperoleh >17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah

Pada tahun 2015 terlihat bahwa 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah menerima 19,72 persen dari seluruh pendapatan. Berdasarkan indikator ketimpangan Bank Dunia, angka tersebut masih dalam tingkat ketimpangan yang rendah karena kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

Membandingkan antara tahun 2014 dan 2015 terlihat bahwa penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran terendah mengalami penurunan yaitu dari 20,32 persen menjadi 19,72 persen, begitu pula penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran sedang mengalami penurunanyaitu dari 35,94 persen menjadi 34,52 persen. Sedangkan pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi terjadi peningkatan persentase yaitu dari 43,74 persen menjadi 45,76 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk secara umum tahun 2015 cenderung kurang baik dibandingkan dengan tahun 2014.

Nilai dari Indeks Gini berkisar 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Indeks Gini Provinsi Lampung dua tahun terakhir mengalami perubahan yaitu 0,35 tahun 2014 menjadi 0,38 tahun 2015. Berdasarkan angka Indeks Gini yang jauh berada di bawah angka 1 ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk antar kelompok pengeluaran di Provinsi Lampung masih tergolong rendah akan tetapi pola distribusi pengeluaran penduduk cenderung kurang baik.

<http://lampung.bps.go.id>

BAB VI KEMISKINAN

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilo kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan (GK).

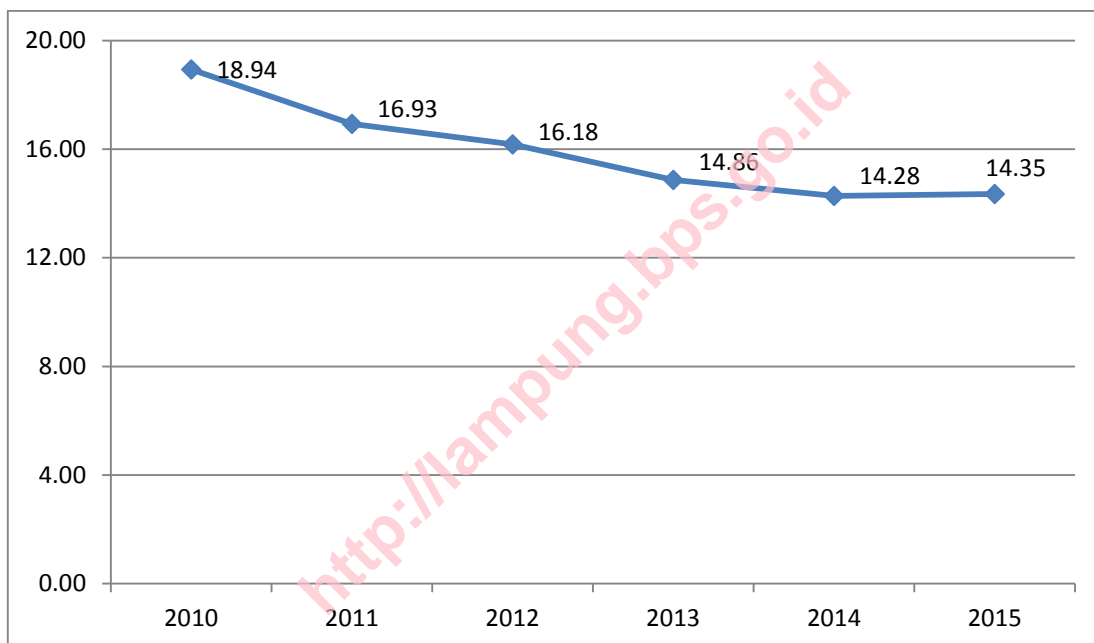
Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count index* (P_0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada suatu wilayah. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah atau seberapa dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak akan berubah jika seseorang yang miskin menjadi bertambah miskin.

Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P_2).

Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

6.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung, 2010-2015

Gambar 6.1. Persentase Penduduk Miskin, 2010-2015



Sumber: BPS, Susenas Maret 2010-2015

Jika memerhatikan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin selama enam tahun terakhir, terlihat kecenderungan menurun, meskipun pada tahun 2015 ada sedikit kenaikan dari 14,28 persen pada Maret 2014 menjadi 14,35 persen pada Maret 2015, kenaikan ini berkisar sebesar 0,07 persen atau sebesar 20,57 ribu jiwa.

Trend penurunan angka kemiskinan yang dialami Provinsi Lampung sejak tahun 2010, tidak terjadi pada Maret 2015. Kenaikan angka kemiskinan yang dialami Provinsi Lampung ini tidak terjadi pada tingkat nasional bahkan angka kemiskinan tingkat nasional mengalami penurunan pada periode Maret 2014-Maret 2015 yaitu sebesar 11,25 persen menjadi 11,22 persen, yang artinya ada penurunan angka kemiskinan sebesar 0,03 persen.

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung menurut Tipe Daerah, Maret 2010-Maret 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	301,73	1178,20	1479,9	14,30	20,65	18,94
2011	243,61	1 064,09	1 307,7	12,27	18,54	16,93
2012	241,10	1 023,39	1 264,48	12,00	17,63	16,18
2013	235,47	939,88	1 175,35	11,59	15,99	14,86
2014	230,63	912,28	1 142,92	11,08	15,41	14,28
2015	233,27	930,22	1 163,49	10,94	15,56	14,35

Sumber: BPS, Susenas Maret 2010-2015

Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih terkonsentrasi di daerah perdesaan yang pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, yaitu 930,22 ribu jiwa atau sebesar 15,56 persen di perdesaan dan 233,27 ribu jiwa atau sebesar 10,94 persen di perkotaan.

Perkembangan angka kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 6.1 yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2010-2015 persentase penduduk miskin di perkotaan cenderung mengalami penurunan, begitu pula di perdesaan cenderung mengalami penurunan, meskipun penurunan itu tidak terjadi di perdesaan pada Maret 2015 yang angka kemiskinannya naik sebesar 0,15 persen dari Maret 2014.

6.2. Perubahan Garis Kemiskinan

Besar kecilnya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan.

Selama Maret 2014 - Maret 2015, garis kemiskinan naik sebesar 10,24 persen, yaitu dari Rp. 306.600,- per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp. 337.996,- per kapita per bulan pada Maret 2015. Kenaikan garis kemiskinan di Provinsi

Lampung mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya di perdesaan yang berada di sekitar garis kemiskinan tidak mampu mengimbangi tingginya kenaikan harga.

Tabel 6.2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret 2013-Maret 2015

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (Ribu) Persentase penduduk miskin		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>Perkotaan</u>	310 464	336 927	370 839	235,47 (11,59%)	230,63 (11,08%)	233,27 (10,94%)
<u>Perdesaan</u>	265 105	295 931	326 283	939,88 (15,99%)	912,28 (15,41%)	930,22 (15,56%)
<u>Perkotaan + Perdesaan</u>	276 759	306 600	337 996	1 175,35 (14,86%)	1 142,92 (14,28%)	1 163,49 (14,35%)

Sumber: BPS, Susenas Maret 2013 – 2015

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Pada Maret 2013, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,77 persen, dan pada bulan Maret 2014, peranannya sedikit meningkat menjadi 75,94 persen sedangkan pada bulan Maret 2015 peranannya kembali turun menjadi 75,11 persen..

Tabel 6.3. Garis Kemiskinan menurut Komponen dan Daerah, Maret 2013 – Maret 2015

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2013	219 565	90 898	310 464
Maret 2014	238 575	98 353	336 927
Maret 2015	260 892	109 948	370 839
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2013	206 280	58 825	265 105
Maret 2014	230 820	65 111	295 931
Maret 2015	251 365	74 918	326 283
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
Maret 2013	209 693	67 066	276 759
Maret 2014	232 838	73 762	306 600
Maret 2015	253 869	84 127	337 996

Sumber: BPS, Susenas Maret2013-2015

6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2014-Maret 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan, begitu pula Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami hal yang sama. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,229 pada Maret 2014 menjadi 2,359 pada keadaan Maret 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,531 menjadi 0,588 pada periode yang sama (Tabel 6.4). Kenaikan indeks ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin jauh.

Tabel 6.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menurut Daerah, Maret 2013-Maret 2015

Uraian	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</i>			
Maret 2013	1,988	2,370	2,272
Maret 2014	1,847	2,364	2,229
Maret 2015	1,673	2,603	2,359
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</i>			
Maret 2013	0,504	0,527	0,522
Maret 2014	0,437	0,564	0,531
Maret 2015	0,379	0,663	0,588

Sumber: BPS, Susenas Maret 2013 - 2015

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Pada bulan Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan 1,673 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,603. Dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan di perkotaan.

Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan 0,379 sementara di daerah perdesaan 0,663. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di perdesaan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dari ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di perkotaan.

BAB VII

PERUMAHAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

7.1. Kualitas Perumahan

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, sumber penerangan dan fasilitas tempat buang air besar.

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki dinding, atap dan lantai. Disamping itu kualitas dari ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi penghuninya. Berdasarkan data Susenas 2014, dapat diketahui persentase rumah tangga berdasarkan kualitas rumah tinggal yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 7.1. menunjukkan indikator kualitas perumahan di Provinsi Lampung dari tahun 2012–2014, ada indikator-indikator yang meningkat dan ada pula yang menurun tetapi tidak begitu signifikan.

Indikator yang mengalami peningkatan antara lain indikator lantai bukan tanah, atap layak, dinding permanen dan rata-rata luas lantai per rumah tangga. Tahun 2012 lantai bukan tanah sebesar 88,18 persen, meningkat di tahun 2013 menjadi 89,07 persen, dan tahun 2014 terus meningkat menjadi 89,88 persen.

Persentase rumah tangga yang menggunakan atap layak tahun 2012-2014 cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2014 ada penurunan sebesar 0,03 persen, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Persentase rumah tangga yang menggunakan atap layak secara berturut-turut dari tahun 2012-2014 sebagai berikut, 99,43 persen, 99,70 persen, dan 99,67 persen.

Sama halnya seperti indikator perumahan lainnya, persentase rumah tangga dengan dinding permanen juga mengalami peningkatan selama tahun 2012-2014. Tahun 2012 persentase rumah tangga yang menggunakan dinding permanen sebesar 88,30 persen, mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 90,41 persen dan tahun 2014 mencapai 90,46 persen.

Rata-rata luas lantai per rumah tangga tahun 2012-2014 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, yaitu secara berturut-turut dari tahun 2012-2014 sebesar 70,61 m², 72,79 m² dan 75,09 m² per rumah tangga. Hal ini menandakan semakin luasnya lahan yang dihuni per rumah tangga.

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, kualitas perumahan di daerah perkotaan masih lebih baik dibandingkan daerah perdesaan, hal ini dapat dilihat melalui indikator-indikator perumahan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding perdesaan.

Lantai bukan tanah daerah perkotaan tahun 2014 sebesar 97,04 persen sedangkan di perdesaan pada tahun yang sama sebesar 87,56 persen. Begitu pula atap layak, dinding permanen dan rata-rata luas lantai berturut-turut di daerah perkotaan sebesar 99,79 persen, 91,53 persen, dan 80,84 persen masih lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan yang sebesar 99,43 persen, 90,12 persen, dan 73,22 persen.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lantai bukan tanah	96,83	97,01	97,04	85,40	86,51	87,56	88,18	89,07	89,88
Atap Layak ¹⁾	99,95	99,85	99,79	99,26	99,65	99,63	99,43	99,70	99,67
Dinding Permanen ²⁾	92,15	93,03	91,53	87,06	89,56	90,12	88,30	90,41	90,46
Rata-rata luas lantai per rumah tangga(m ²)	76,93	76,87	80,84	68,59	71,48	73,22	70,61	72,79	75,09

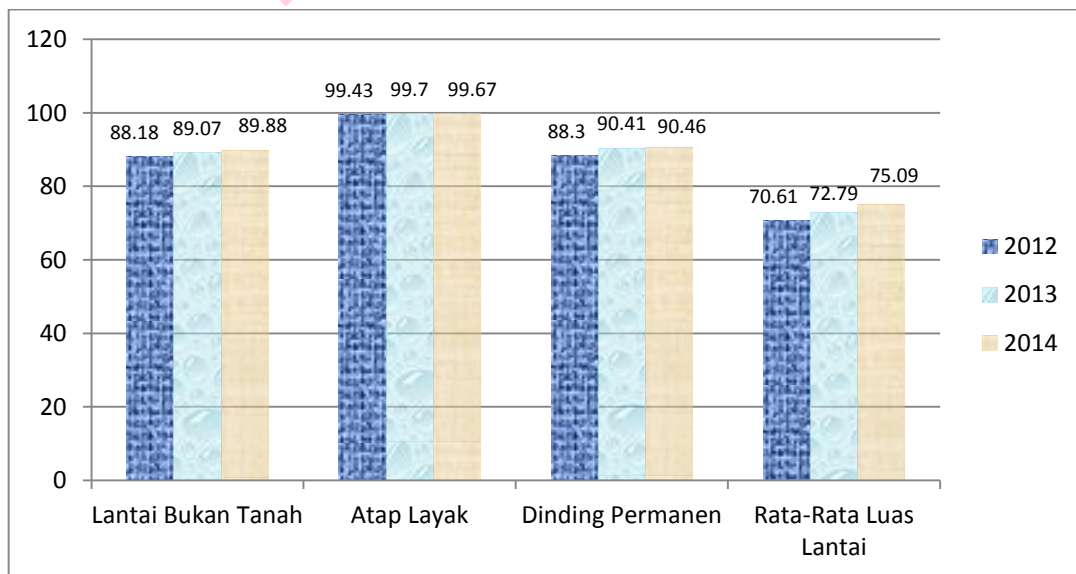
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

Catatan : 1) Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes

2) Dinding permanen : tembok dan kayu

Gambar 7.1 memperlihatkan beberapa indikator perumahan seperti lantai bukan tanah, atap layak, dinding permanen dan rata-rata luas lantai per rumah tangga pada tahun 2012-2014. Dari gambar tersebut dapat dilihat dengan mudah indikator-indikator yang mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun 2012-2014.

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

7.2. Air Bersih dan Sanitasi

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan dari rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Tahun 2012-2014, rumah tangga di Provinsi Lampung yang menggunakan air ledeng dan air kemasan/isi ulang sebagai sumber air minum secara berturut-turut yaitu 16,38 persen, 17,10 persen dan 18,68 persen (tabel 7.2).

Tahun 2014 umumnya pengguna air minum ledeng dan air kemasan/isi ulang adalah rumah tangga di daerah perkotaan, yaitu 45,67 persen, sedangkan di perdesaan hanya 9,93 persen. Tingginya pengguna air minum ledeng dan air kemasan di daerah perkotaan dimungkinkan karena fasilitas di daerah perkotaan lebih tersedia, khususnya untuk air minum ledeng.

Selain penggunaan air minum ledeng dan air kemasan/isi ulang, indikator yang menentukan tingkat kenyamanan dari rumah tinggal adalah ketersediaan air minum bersih yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) lebih dari 10 meter. Tabel 7.2 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menggunakan air minum bersih di Provinsi Lampung mencapai 49,63 persen tahun 2012, dan mengalami peningkatan menjadi 53,61 persen tahun 2013 akan tetapi di tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 51,12 persen.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ledeng dan air kemasan/isi ulang	44,77	42,09	45,67	7,26	9,04	9,93	16,38	17,10	18,68
Air Minum Bersih*)	69,92	69,12	70,22	43,12	48,61	44,92	49,63	53,61	51,12
Jamban Sendiri	85,12	86,11	87,23	75,28	78,96	80,08	77,67	80,70	81,83

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

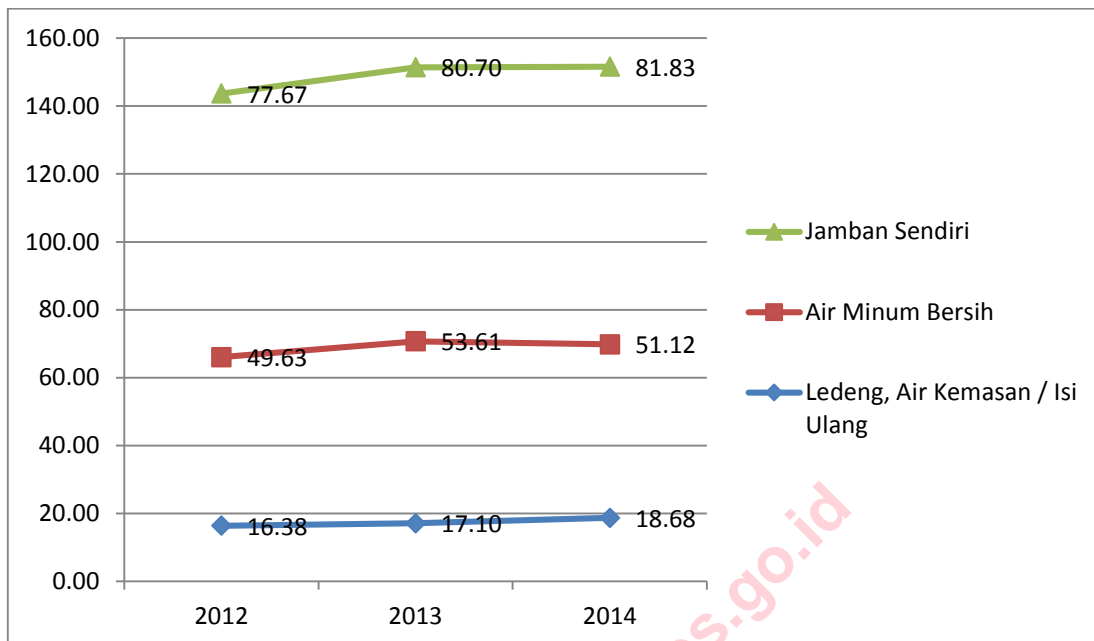
*) Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 m

Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga yang mengakses air minum bersih di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu secara berturut-turut tahun 2012-2014 sebesar 69,92 persen, 69,12 persen dan 70,22 persen di perkotaan dan 43,12 persen, 48,61 persen, 44,92 persen di perdesaan.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri.

Selama tahun 2012-2014 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, tahun 2012 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar 77,67 persen dan naik menjadi 80,70 persen di tahun 2013 dan di tahun 2014 naik menjadi 81,83 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri berada di daerah perkotaan dari tahun 2012-2014 berturut-turut sebesar 85,12 persen, 86,11 persen dan 87,23 persen, sedangkan daerah perdesaan sebesar 75,28 persen, 78,96 persen dan 80,08 persen.

Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

7.3. Fasilitas Penerangan Tempat Tinggal

Fasilitas perumahan selain kualitas dinding, atap, dan lantai serta ketersediaan air minum dan jamban, yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik, karena cahaya yang dihasilkan dari listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya, seperti petromak, pelita, sentir ataupun obor.

Berdasarkan data Susenas, penerangan listrik yang dimaksud adalah penerangan listrik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN, untuk penerangan yang bersumber dari PLN termasuk juga rumah tangga yang menggunakan listrik tanpa meteran ataupun menyambung dari rumah tangga lain.

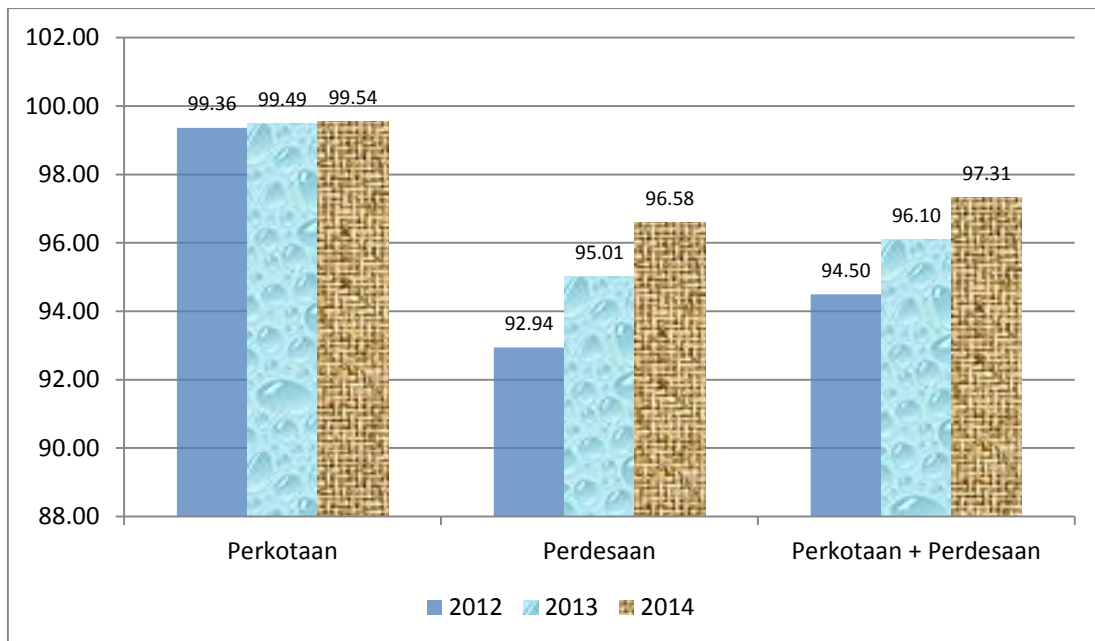
Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Daerah Tempat Tinggal	Tahun		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	99,36	99,49	99,54
Perdesaan	92,94	95,01	96,58
Perkotaan + Perdesaan	94,50	96,10	97,31

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

Berdasarkan Tabel 7.3 pada tahun 2012 rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama di Provinsi Lampung sebesar 94,50 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 96,10 persen dan 97,31 persen. Apabila dilihat dari wilayahnya peningkatan juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Pada tahun 2012 rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di daerah perkotaan sebesar 99,36 persen dan naik menjadi 99,49 persen dan 99,54 persen di tahun 2013 dan 2014 sedangkan di perdesaan juga mengalami peningkatan dari 92,94 persen di tahun 2012 menjadi 95,01 persen di tahun 2013 dan 96,58 persen di tahun 2014.

Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

<http://lampung.bps.go.id>

BAB VIII

SOSIAL LAINNYA

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya yang tidak termasuk dalam enam aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: persentase penduduk yang melakukan perjalanan "wisata", persentase penduduk yang menikmati informasi dan hiburan, meliputi akses terhadap internet dan persentase rumah tangga yang menguasai media informasi seperti telepon, telepon seluler dan komputer, serta persentase rumah tangga yang membeli beras murah/miskin (raskin).

Kegiatan "wisata" dapat menunjukkan kesejahteraan seseorang karena wisata merupakan kebutuhan tersier. Umumnya semakin sejahtera seseorang, maka semakin tinggi peluang untuk memenuhi kebutuhan non primer. Sedangkan kepemilikan dan akses terhadap media informasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang yang dapat merubah pandangan dan cara hidupnya kearah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan dan akses terhadap media informasi juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang. Sedangkan persentase rumah tangga yang membeli raskin menunjukkan seberapa banyak rumah tangga yang memanfaatkan program pemerintah dalam mensejahterakan rumah tangga miskin.

8.1. Perjalanan atau Bepergian

Konsep perjalanan / bepergian yang digunakan BPS dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dengan jarak perjalanan pergi dan pulang (pp) sejauh minimal 100 kilometer dan tidak dalam rangka memberi nafkah serta tidak dilakukan secara rutin. Berdasarkan konsep ini, maka data tabel 8.1 menunjukkan bahwa tahun 2014 persentase penduduk Provinsi Lampung yang melakukan perjalanan/bepergian mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012 persentase penduduk yang melakukan perjalanan/bepergian sebesar 10,94 persen dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 11,67 persen, akan tetapi tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 7,58 persen.

Tabel 8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan / Bepergian menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	13,84	9,93	10,94
2013	13,60	10,99	11,67
2014	7,07	7,76	7,58

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

Jika dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan dapat diketahui bahwa penduduk yang melakukan perjalanan/bepergian dari tahun ke tahun, umumnya lebih banyak dilakukan oleh penduduk di daerah perkotaan, akan tetapi tahun 2014 penduduk perdesaan lebih banyak melakukan perjalanan/bepergian, yaitu sebesar 7,76 persen berbanding 7,07 persen di daerah perkotaan.

8.2 Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui berbagai media massa dan media elektronik, seperti komputer. Namun perangkat komputer dan situs internet masih belum populer di kalangan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer. Tabel 8.2 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang sudah menguasai komputer mengalami pergerakan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sebesar 9,80 persen dan mengalami penurunan tahun 2013 menjadi 9,10 persen, akan tetapi di tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 10,37 persen. Komputer yang dimaksud adalah berupa personal *computer/desktop* termasuk *laptop* atau *notebook*.

Jika dilihat tahun 2014, rumah tangga yang menguasai komputer lebih dominan di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Di daerah perkotaan persentase rumah tangga yang mempunyai komputer mencapai 24,23 persen jauh lebih tinggi bila

dibandingkan daerah perdesaan yang hanya 5,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan komputer masih terbatas pada kalangan tertentu.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Telepon Rumah	9,97	7,22	8,40	2,07	2,36	1,99	3,99	3,55	3,56
Telepon Seluler	93,71	94,27	94,29	82,72	85,58	87,48	85,39	87,70	89,15
Komputer	26,93	21,44	24,23	4,31	5,13	5,87	9,80	9,10	10,37

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

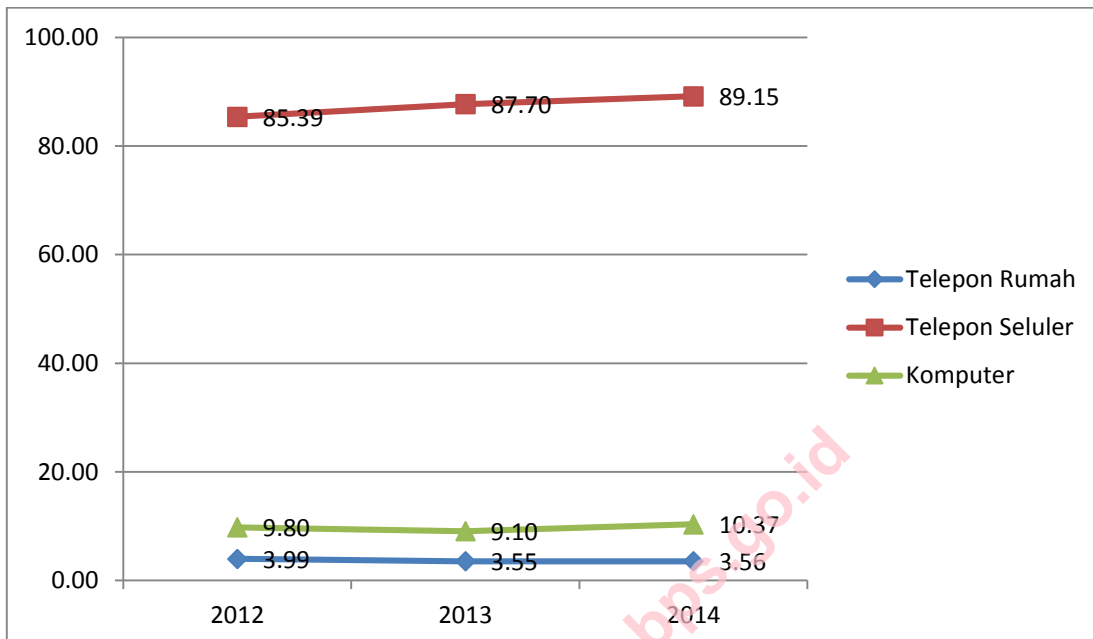
Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan dengan telepon rumah, karena harga telepon seluler maupun pulasanya cukup bersaing dibandingkan dengan telepon rumah, telepon seluler juga lebih diminati karena lebih praktis dibawa kemana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi dimanapun berada dengan ditunjang oleh jangkauan yang semakin meluas.

Hal ini dapat ditunjukkan dari rendahnya persentase rumah tangga yang menguasai telepon rumah dibandingkan yang menguasai telepon seluler. Tabel 8.2 memperlihatkan bahwa selama tahun 2012-2014 rumah tangga yang menguasai telepon rumah mengalami penurunan sebesar 0,43 persen. Tahun 2012 persentase rumah tangga yang menguasai telepon rumah mencapai 3,99 persen mengalami kecenderungan menurun hingga tahun 2014.

Sedangkan persentase rumah tangga yang menguasai telepon seluler mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang memiliki telpon seluler sebesar 85,39 persen, naik pada tahun 2013 menjadi 87,70 persen hingga tahun 2014 mencapai 89,15 persen.

Peningkatan persentase rumah tangga yang menguasai telepon seluler ini terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sehingga antara perkotaan dan perdesaan tidak terjadi perbedaan yang signifikan, yaitu di daerah perkotaan sebesar 94,29 persen di tahun 2014 dan di perdesaan sebesar 87,48 persen.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2012-2014



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

8.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Selain dari aspek kesejahteraan yang dilihat dari kegiatan melakukan perjalanan / bepergian dan akses teknologi dan informasi yang dicakup dalam Susenas. Dalam sub bab ini, disajikan pula keadaan sosial ekonomi rumah tangga dilihat dari program perlindungan sosial yang didapat oleh rumah tangga, akan tetapi hanya dibatasi pada program pembeli beras miskin (raskin).

Raskin merupakan beras murah yang disediakan oleh Bulog/Dolog dan diperuntukkan khusus untuk rumah tangga miskin, raskin dapat diperoleh dengan cara membeli di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Data mengenai raskin di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 8.3.

Pada periode tahun 2012-2014, persentase rumah tangga pembeli raskin di Provinsi Lampung relatif naik turun. Tahun 2012 persentase rumah tangga pembeli raskin sebesar 64,34 persen sedangkan tahun 2013 turun menjadi 63,27 persen dan kembali naik menjadi 63,42 persen. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, di daerah perdesaan persentase rumah tangga pembeli raskin lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yaitu selama tahun 2012-2014 secara berturut-turut di daerah perdesaan sebesar 71,28 persen, 68,82 persen dan 69,27 persen sedangkan di perkotaan secara

berturut-turut dari tahun 2012-2014 yaitu, sebesar 42,70 persen, 46,03 persen dan 45,36 persen.

Sedangkan rata-rata raskin yang dibeli selama 3 bulan terakhir periode tahun 2012-2014 semakin tahun semakin sedikit. Tahun 2012 rata-rata raskin yang dibeli sebanyak 9,03 kilogram, menurun di tahun 2013 menjadi 5,53 kilogram dan tahun 2014 menjadi 5,39 kilogram per rumah tangga per bulan.

Akan tetapi, pada tahun 2012-2014 rata-rata harga raskin per kilogram semakin tahun semakin meningkat. Tahun 2012 harga rata-rata per kilogram Rp. 2.093,89 dan tahun 2013 sebesar Rp. 2.164,51 per kilogram hingga tahun 2014 mencapai Rp. 2.177,51 per kilogram.

Tabel 8.3. Indikator- Indikator Raskin menurut Daerah Tempat Tinggal, 2012-2014

Indikator Raskin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rumah tangga pembeli raskin (%)	42,70	46,03	45,36	71,28	68,82	69,27	64,34	63,27	63,42
Rata-rata raskin yang dibeli per-bulan (Kg)	8,38	6,49	6,39	9,16	5,32	5,19	9,03	5,53	5,39
Rata-rata harga raskin yang dibeli per Kg (Rp)	2 073,95	2 156,14	2 213,85	2 097,72	2 166,31	2 169,80	2 093,89	2 164,51	2 177,51

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Backcasting 2012-2013, 2014

<http://lampung.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://lampung.bps.go.id>

<http://lampung.bps.go.id>

Tabel A.1. Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	65,32	65,45	65,58	65,69	66,02
Tanggamus	66,46	66,58	66,69	66,79	67,12
Lampung Selatan	67,55	67,64	67,73	67,80	68,12
Lampung Timur	68,78	68,86	68,94	69,01	69,33
Lampung Tengah	68,34	68,43	68,51	68,59	68,91
Lampung Utara	67,32	67,45	67,57	67,68	68,02
Way Kanan	67,64	67,73	67,81	67,89	68,21
Tulang Bawang	68,48	68,54	68,59	68,64	68,94
Pesawaran	66,74	66,84	66,93	67,01	67,33
Pringsewu	67,40	67,50	67,60	67,69	68,01
Mesuji	66,30	66,44	66,57	66,70	67,05
Tulang Bawang Barat	68,41	68,50	68,58	68,66	68,98
Pesisir Barat	60,78	60,99	61,19	61,37	61,74
Kota Bandar Lampung	70,21	70,23	70,24	70,26	70,55
Kota Metro	70,59	70,62	70,65	70,68	70,98
Provinsi Lampung	68,91	69,12	69,33	69,55	69,66

Tabel A.2. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun Bersalin	Keluarga /Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	9,35	61,95	0,35	26,50	1,85	100,00
Tanggamus	4,44	77,96	0,52	17,08	0,00	100,00
Lampung Selatan	8,99	74,87	0,00	16,14	0,00	100,00
Lampung Timur	13,44	83,27	0,00	2,62	0,68	100,00
Lampung Tengah	13,91	81,42	0,00	4,67	0,00	100,00
Lampung Utara	9,81	69,95	0,49	19,74	0,00	100,00
Way Kanan	5,64	69,68	0,37	23,50	0,81	100,00
Tulang Bawang	10,41	71,60	0,00	17,56	0,42	100,00
Pesawaran	10,38	76,98	0,00	12,13	0,51	100,00
Pringsewu	13,07	76,73	2,99	7,22	0,00	100,00
Mesuji	6,95	57,74	2,66	32,64	0,00	100,00
Tulang Bawang Barat	9,76	80,04	0,56	9,64	0,00	100,00
Kota Bandar Lampung	19,68	78,33	0,00	1,99	0,00	100,00
Kota Metro	32,23	66,59	0,00	1,18	0,00	100,00
Provinsi Lampung	11,75	75,66	0,34	11,97	0,28	100,00

Tabel A.3. Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	98,48	96,58	97,60
Tanggamus	97,01	94,56	95,85
Lampung Selatan	97,16	93,30	95,29
Lampung Timur	97,37	93,64	95,55
Lampung Tengah	96,62	96,87	96,75
Lampung Utara	98,14	98,02	98,08
Way Kanan	97,91	93,45	95,76
Tulang Bawang	97,62	97,09	97,36
Pesawaran	97,86	98,91	98,37
Pringsewu	96,60	97,08	96,84
Mesuji	96,72	93,41	95,15
Tulang Bawang Barat	98,23	96,46	97,36
Kota Bandar Lampung	99,23	99,14	99,18
Kota Metro	98,99	97,48	98,23
Provinsi Lampung	97,62	96,10	96,88

Tabel A.4. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas menurut Tipe Daerah dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Total (4)
Lampung Barat	8,17	6,90	7,00
Tanggamus	7,90	6,63	6,84
Lampung Selatan	8,42	6,85	7,27
Lampung Timur	8,48	7,37	7,46
Lampung Tengah	8,49	7,07	7,22
Lampung Utara	9,54	7,38	7,83
Way Kanan	7,47	7,11	7,13
Tulang Bawang	8,30	7,42	7,53
Pesawaran	8,08	7,39	7,45
Pringsewu	8,58	7,21	7,69
Mesuji	6,71	6,49	6,50
Tulang Bawang Barat	7,94	7,00	7,09
Kota Bandar Lampung	9,57	7,17	9,55
Kota Metro	9,93	8,90	9,91
Provinsi Lampung	9,09	7,10	7,62

Tabel A.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Tidak/Be- lum Pernah Sekolah	Tidak Punya Ijazah SD	Laki-laki			
			SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	1,70	22,50	37,06	20,51	15,72	2,51
Tanggamus	1,63	25,96	35,49	20,46	14,06	2,42
Lampung Selatan	2,18	21,72	31,67	20,96	20,74	2,74
Lampung Timur	1,82	19,79	31,74	23,86	19,71	3,09
Lampung Tengah	1,75	24,74	29,29	22,96	18,43	2,82
Lampung Utara	1,09	20,18	28,33	22,12	24,17	4,11
Way Kanan	1,60	20,11	35,47	24,75	15,95	2,12
Tulang Bawang	2,45	20,38	27,47	22,39	24,18	3,13
Pesawaran	0,91	23,40	28,33	24,41	20,39	2,56
Pringsewu	1,89	20,49	30,48	23,86	19,97	3,31
Mesuji	0,82	22,62	42,58	24,29	8,18	1,50
Tulang Bawang Barat	3,50	18,99	36,07	21,06	18,00	2,37
Kota Bandar Lampung	0,88	14,58	18,42	17,25	35,44	13,42
Kota Metro	0,75	13,44	18,31	18,31	34,77	14,41
Provinsi Lampung	1,65	20,98	29,99	21,85	21,21	4,31

Tabel A.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Tidak/Be- lum Pernah Sekolah	Tidak Punya Ijazah SD	Perempuan			
			SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	3,25	23,89	39,13	19,78	11,76	2,18
Tanggamus	4,48	29,94	31,99	18,26	11,86	3,47
Lampung Selatan	5,15	25,97	29,79	18,30	17,53	3,27
Lampung Timur	5,44	20,67	30,92	24,34	15,58	3,05
Lampung Tengah	6,74	25,94	25,41	22,16	17,04	2,71
Lampung Utara	4,18	19,17	31,30	21,80	18,31	5,25
Way Kanan	5,08	23,49	34,02	22,58	12,66	2,18
Tulang Bawang	4,45	22,80	31,58	22,43	15,77	2,97
Pesawaran	4,27	23,41	29,58	24,69	13,82	4,22
Pringsewu	5,60	18,36	29,22	23,51	18,61	4,69
Mesuji	4,53	27,24	40,00	19,64	6,75	1,83
Tulang Bawang Barat	7,50	24,35	28,72	22,27	13,97	3,19
Kota Bandar Lampung	2,12	17,01	19,50	17,00	30,49	13,88
Kota Metro	2,03	12,94	18,78	19,06	29,92	17,27
Provinsi Lampung	4,78	22,76	28,97	21,04	17,59	4,87

Tabel A.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan					
	Tidak/Be- lum Pernah Sekolah	Tidak Punya Ijazah SD	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	2,42	23,14	38,02	20,18	13,89	2,36
Tanggamus	2,98	27,85	33,82	19,41	13,01	2,92
Lampung Selatan	3,62	23,79	30,75	19,67	19,18	2,99
Lampung Timur	3,58	20,22	31,34	24,10	17,69	3,07
Lampung Tengah	4,20	25,33	27,38	22,57	17,75	2,77
Lampung Utara	2,61	19,68	29,79	21,96	21,28	4,67
Way Kanan	3,28	21,74	34,77	23,70	14,36	2,15
Tulang Bawang	3,42	21,55	29,47	22,41	20,10	3,05
Pesawaran	2,54	23,41	28,94	24,55	17,21	3,36
Pringsewu	3,70	19,45	29,87	23,69	19,31	3,99
Mesuji	2,58	24,81	41,36	22,09	7,50	1,66
Tulang Bawang Barat	5,46	21,62	32,47	21,66	16,03	2,77
Kota Bandar Lampung	1,50	15,80	18,96	17,13	32,97	13,65
Kota Metro	1,39	13,19	18,55	18,69	32,33	15,85
Provinsi Lampung	3,17	21,85	29,49	21,45	19,45	4,58

Tabel A.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Dinding Permanen menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	94,37	90,30	90,60
Tanggamus	85,14	90,46	89,61
Lampung Selatan	89,54	80,71	82,95
Lampung Timur	91,64	93,90	93,73
Lampung Tengah	86,50	90,93	90,48
Lampung Utara	92,82	88,07	88,98
Way Kanan	93,90	94,35	94,33
Tulang Bawang	79,75	88,08	87,06
Pesawaran	73,78	88,98	87,76
Pringsewu	88,94	91,39	90,57
Mesuji	100,00	95,74	95,85
Tulang Bawang Barat	93,29	93,95	93,89
Kota Bandar Lampung	94,29	88,27	94,23
Kota Metro	94,73	100,00	94,83
Provinsi Lampung	91,53	90,12	90,46

Ket: Dinding permanen : Tembok dan Kayu

Tabel A.7. Rata-Rata Luas Lantai per Rumah Tangga (m²) menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	101,33	61,62	64,60
Tanggamus	80,67	69,26	71,10
Lampung Selatan	71,56	65,04	66,69
Lampung Timur	88,87	83,52	83,93
Lampung Tengah	90,89	92,77	92,58
Lampung Utara	85,63	61,36	66,00
Way Kanan	83,09	64,84	65,54
Tulang Bawang	61,89	59,27	59,59
Pesawaran	76,97	65,78	66,68
Pringsewu	77,49	72,87	74,42
Mesuji	58,82	61,37	61,30
Tulang Bawang Barat	86,57	74,86	75,92
Kota Bandar Lampung	81,26	61,29	81,05
Kota Metro	82,73	80,32	82,68
Provinsi Lampung	80,84	73,22	75,09

Tabel A.8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	0,00	1,62	1,50
Tanggamus	3,28	1,14	1,48
Lampung Selatan	7,38	4,62	5,32
Lampung Timur	4,24	1,76	1,95
Lampung Tengah	5,28	1,74	2,10
Lampung Utara	10,40	2,24	3,80
Way Kanan	0,00	0,52	0,50
Tulang Bawang	0,00	2,66	2,34
Pesawaran	4,32	1,46	1,69
Pringsewu	3,95	1,94	2,62
Mesuji	4,00	1,63	1,70
Tulang Bawang Barat	0,00	0,82	0,75
Kota Bandar Lampung	11,67	0,00	11,55
Kota Metro	9,65	0,36	9,48
Provinsi Lampung	8,40	1,99	3,56

Tabel A.9. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Atap Layak menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Total (4)
Lampung Barat	94,58	99,51	99,14
Tanggamus	100,00	99,06	99,21
Lampung Selatan	99,95	100,00	99,99
Lampung Timur	100,00	100,00	100,00
Lampung Tengah	100,00	99,88	99,89
Lampung Utara	100,00	100,00	100,00
Way Kanan	100,00	99,42	99,44
Tulang Bawang	100,00	98,63	98,80
Pesawaran	100,00	99,74	99,76
Pringsewu	100,00	100,00	100,00
Mesuji	93,28	97,06	96,96
Tulang Bawang Barat	100,00	100,00	100,00
Kota Bandar Lampung	99,79	100,00	99,80
Kota Metro	100,00	98,93	99,98
Provinsi Lampung	99,79	99,63	99,67

Ket: Atap layak : Beton, genteng, sirap, seng dan asbes

Tabel A.10. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Ledeng dan Kemasan / Isi Ulang menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	30,54	12,56	13,91
Tanggamus	30,47	4,61	8,78
Lampung Selatan	32,47	22,80	25,26
Lampung Timur	7,00	4,39	4,59
Lampung Tengah	15,26	3,36	4,56
Lampung Utara	10,37	0,44	2,33
Way Kanan	1,50	2,95	2,89
Tulang Bawang	43,74	38,61	39,24
Pesawaran	22,80	13,81	14,54
Pringsewu	16,77	6,44	9,91
Mesuji	28,01	22,07	22,23
Tulang Bawang Barat	18,90	1,52	3,08
Kota Bandar Lampung	74,33	42,61	74,00
Kota Metro	28,10	8,41	27,73
Provinsi Lampung	45,67	9,93	18,68

Tabel A.11. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	96,85	88,98	89,57
Tanggamus	93,91	82,47	84,31
Lampung Selatan	91,45	86,67	87,89
Lampung Timur	84,66	88,06	87,80
Lampung Tengah	92,73	88,46	88,89
Lampung Utara	94,17	87,47	88,75
Way Kanan	96,64	86,21	86,61
Tulang Bawang	96,46	94,21	94,49
Pesawaran	97,23	86,22	87,11
Pringsewu	90,13	83,32	85,61
Mesuji	85,94	87,63	87,59
Tulang Bawang Barat	88,87	87,40	87,54
Kota Bandar Lampung	96,31	94,87	96,30
Kota Metro	96,37	90,24	96,25
Provinsi Lampung	94,29	87,48	89,15

Tabel A.12. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Lantai Bukan Tanah menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	92,10	79,08	80,06
Tanggamus	96,30	69,22	73,58
Lampung Selatan	96,04	91,05	92,31
Lampung Timur	92,12	91,55	91,60
Lampung Tengah	97,29	93,94	94,28
Lampung Utara	96,20	88,58	90,04
Way Kanan	89,83	87,03	87,14
Tulang Bawang	94,87	88,08	88,91
Pesawaran	87,74	86,40	86,50
Pringsewu	92,89	84,43	87,27
Mesuji	91,91	76,79	77,20
Tulang Bawang Barat	100,00	92,21	92,91
Kota Bandar Lampung	98,98	100,00	98,99
Kota Metro	98,93	97,15	98,90
Provinsi Lampung	97,04	87,56	89,88

Tabel A.13. Persentase Rumah Tangga yang Mengonsumsi Air Bersih menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	57,44	47,48	48,22
Tanggamus	63,81	33,83	38,66
Lampung Selatan	46,63	53,11	51,46
Lampung Timur	61,56	48,60	49,58
Lampung Tengah	61,91	51,57	52,62
Lampung Utara	37,56	22,68	25,52
Way Kanan	5,71	9,33	9,19
Tulang Bawang	54,88	63,16	62,15
Pesawaran	93,11	60,58	63,20
Pringsewu	51,58	50,59	50,92
Mesuji	55,55	57,38	57,33
Tulang Bawang Barat	25,61	25,13	25,18
Kota Bandar Lampung	89,08	82,33	89,01
Kota Metro	74,12	84,68	74,32
Provinsi Lampung	70,22	44,92	51,12

Tabel A.14. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Desktop/PC/Laptop menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	5,42	4,21	4,30
Tanggamus	18,70	3,30	5,78
Lampung Selatan	12,75	4,50	6,60
Lampung Timur	18,74	6,81	7,71
Lampung Tengah	21,04	8,18	9,49
Lampung Utara	20,93	3,49	6,82
Way Kanan	6,78	2,84	2,99
Tulang Bawang	11,20	9,56	9,76
Pesawaran	19,62	6,11	7,19
Pringsewu	21,03	7,58	12,09
Mesuji	0,00	3,70	3,60
Tulang Bawang Barat	9,01	6,55	6,77
Kota Bandar Lampung	29,99	4,06	29,72
Kota Metro	38,72	29,22	38,54
Provinsi Lampung	24,23	5,87	10,37

Tabel A.15. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sendiri menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	80,54	69,35	70,19
Tanggamus	64,52	57,76	58,85
Lampung Selatan	88,36	81,57	83,30
Lampung Timur	90,40	86,73	87,01
Lampung Tengah	91,59	85,01	85,67
Lampung Utara	89,40	84,16	85,16
Way Kanan	92,61	82,04	82,44
Tulang Bawang	98,32	88,06	89,31
Pesawaran	79,64	68,14	69,06
Pringsewu	76,86	68,05	71,00
Mesuji	67,82	86,73	86,22
Tulang Bawang Barat	96,24	89,22	89,85
Kota Bandar Lampung	88,82	69,92	88,62
Kota Metro	89,25	90,73	89,28
Provinsi Lampung	87,23	80,08	81,83

Tabel A.16. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	97,73	84,01	85,03
Tanggamus	98,97	88,01	89,77
Lampung Selatan	99,05	99,57	99,44
Lampung Timur	98,35	99,13	99,07
Lampung Tengah	100,00	99,03	99,13
Lampung Utara	100,00	97,51	97,98
Way Kanan	100,00	95,19	95,37
Tulang Bawang	100,00	97,65	97,94
Pesawaran	100,00	96,47	96,75
Pringsewu	100,00	98,21	98,81
Mesuji	100,00	99,05	99,08
Tulang Bawang Barat	100,00	99,15	99,23
Kota Bandar Lampung	99,56	100,00	99,56
Kota Metro	100,00	100,00	100,00
Provinsi Lampung	99,54	96,58	97,31

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2013*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Lampung Dalam Angka 2014*

<http://lampung.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

<http://lampung.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung , 35215

Telp (0721) 482909, Fax (0721) 484329

Email : bps1800@bps.go.id

Homepage : [//lampung.bps.go.id](http://lampung.bps.go.id)

ISSN 1907-4573



9 771 907 4 57006